



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 009.25.3, 1/Kep.559-30g/XII/2024

TENTANG

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KOTA BEKASI
TAHUN 2024-2026

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dalam menghasilkan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dibutuhkan peta proses bisnis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bekasi tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Paraf Koordinasi	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 6);
8. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 9);
9. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 37 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 37);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor : 000.8.3.1/423.2/SETDA.Org tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024-2026.
- KEDUA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, terdiri atas 15 proses pada Level 0, 38 proses pada Level 1, dan 93 proses pada Level 2, merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi serta pedoman untuk menghasilkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Paraf Koordinasi	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 065/Kep.516-Org/X/2021 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Bekasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 4 Desember 2024

Pj.WALI KOTA BEKASI,

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	



R. GANI MUHAMAD

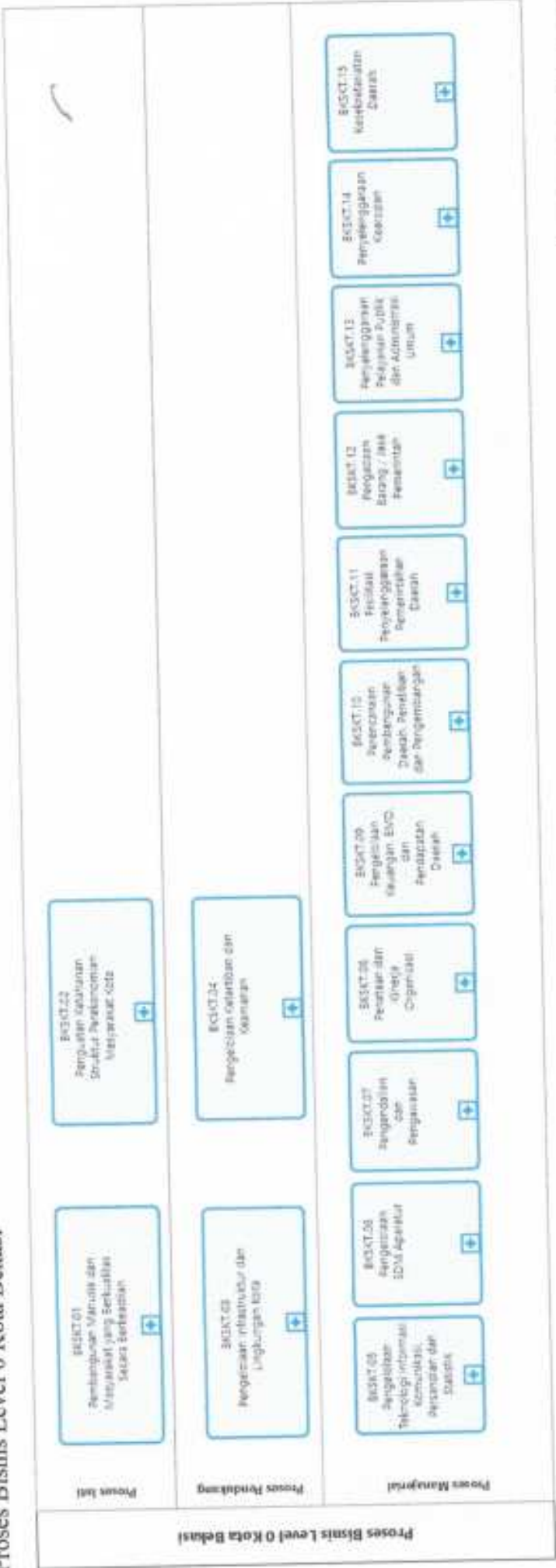
Tembusan Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Inspektur Kota Bekasi;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 303.5.3.1/Kes.559-Org/XII/2024
TENTANG PETA PROSES BISNIS
PEMERINTAH
KOTA BEKASI TAHUN 2024-2026

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KOTA BEKASI
TAHUN 2024-2026

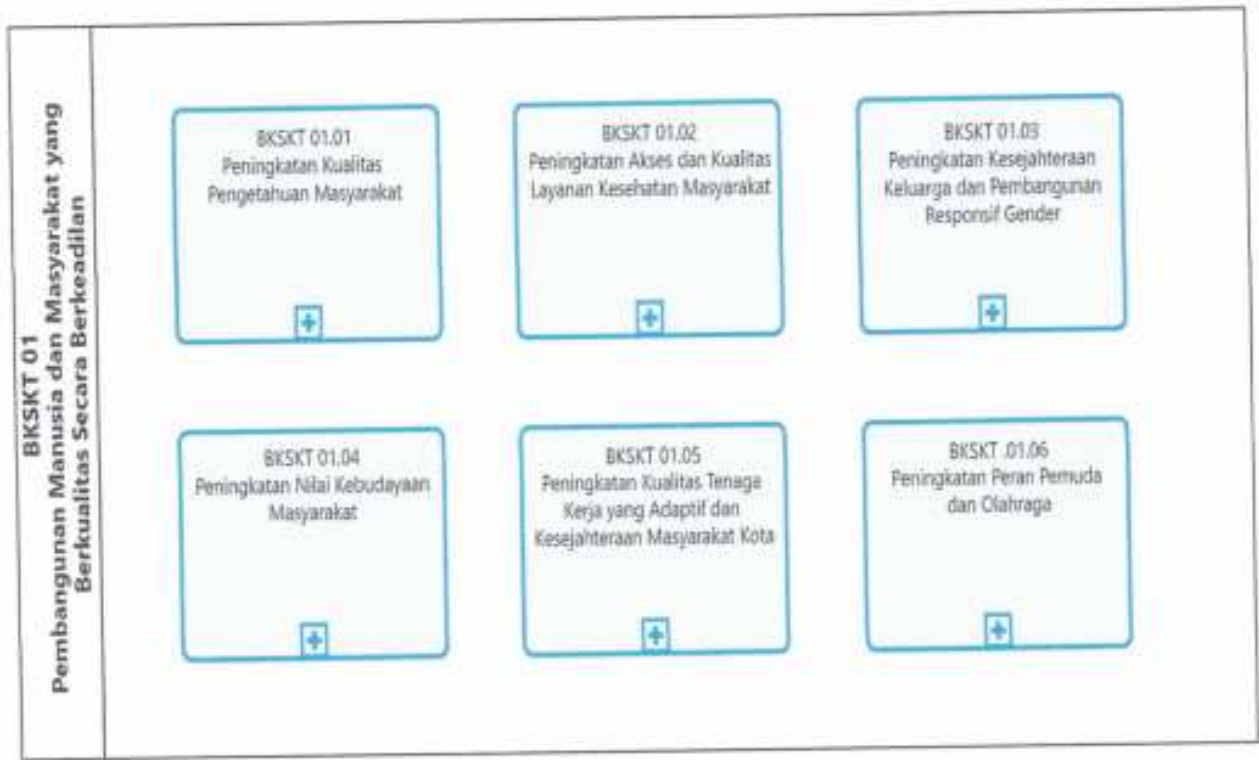
Proses Bisnis Level 0 Kota Bekasi



Paraf Koordinasi	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

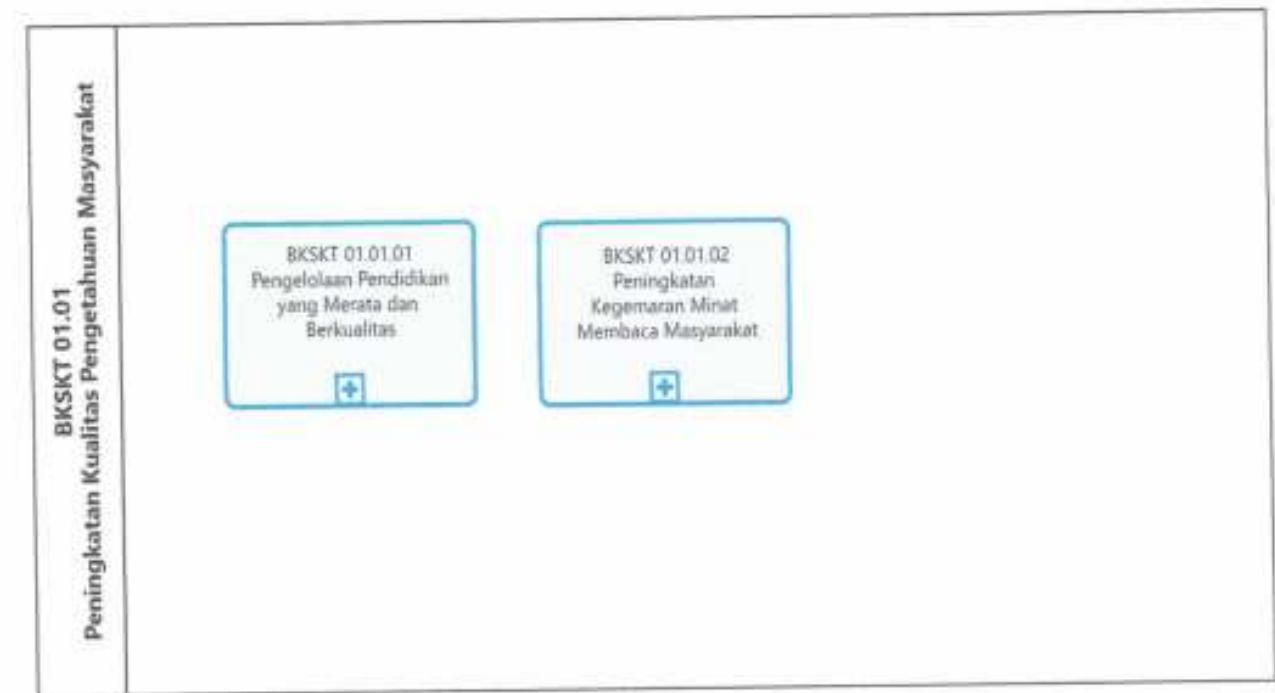
Proses Bisnis Level 1 Kota Bekasi

BKSKT 01



Proses Bisnis Level 2 Kota Bekasi

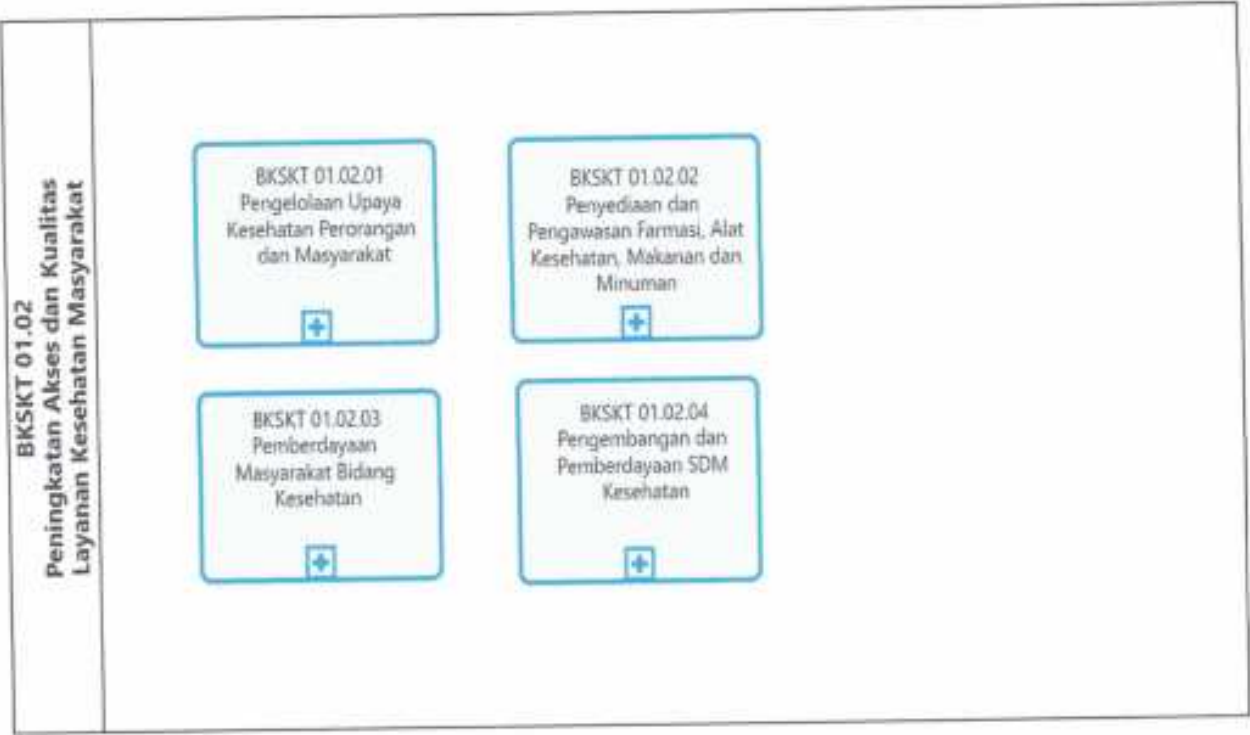
BKSKT 01.01



Paraf Koordinasi	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

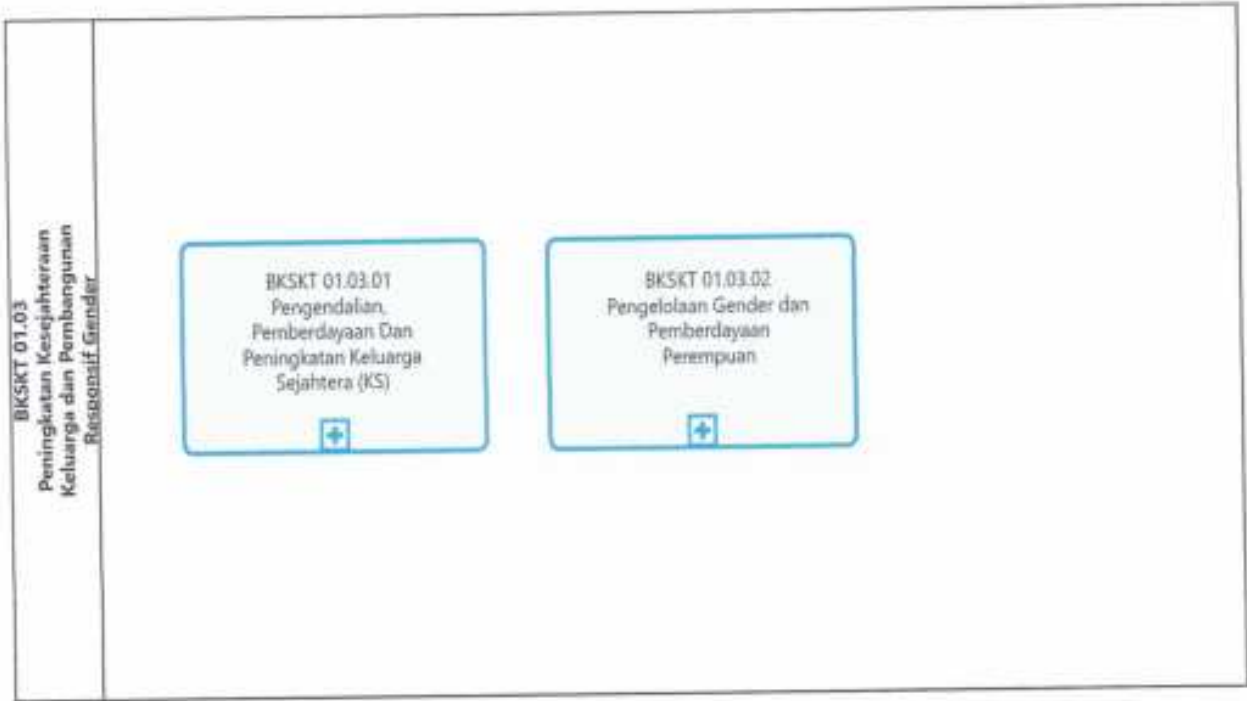
Proses Bisnis Level 2 Kota Bekasi

BKSKT 01.02



Proses Bisnis Level 2 Kota Bekasi

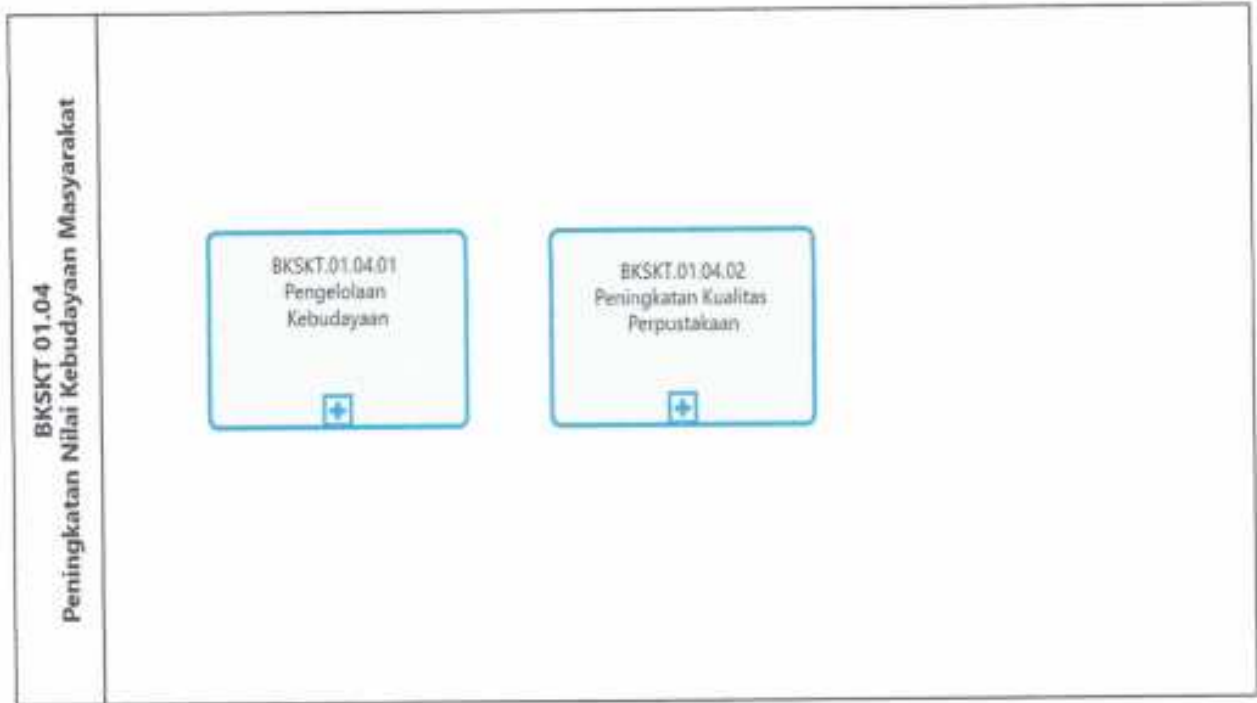
BKSKT 01.03



Paraf Koordinasi	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

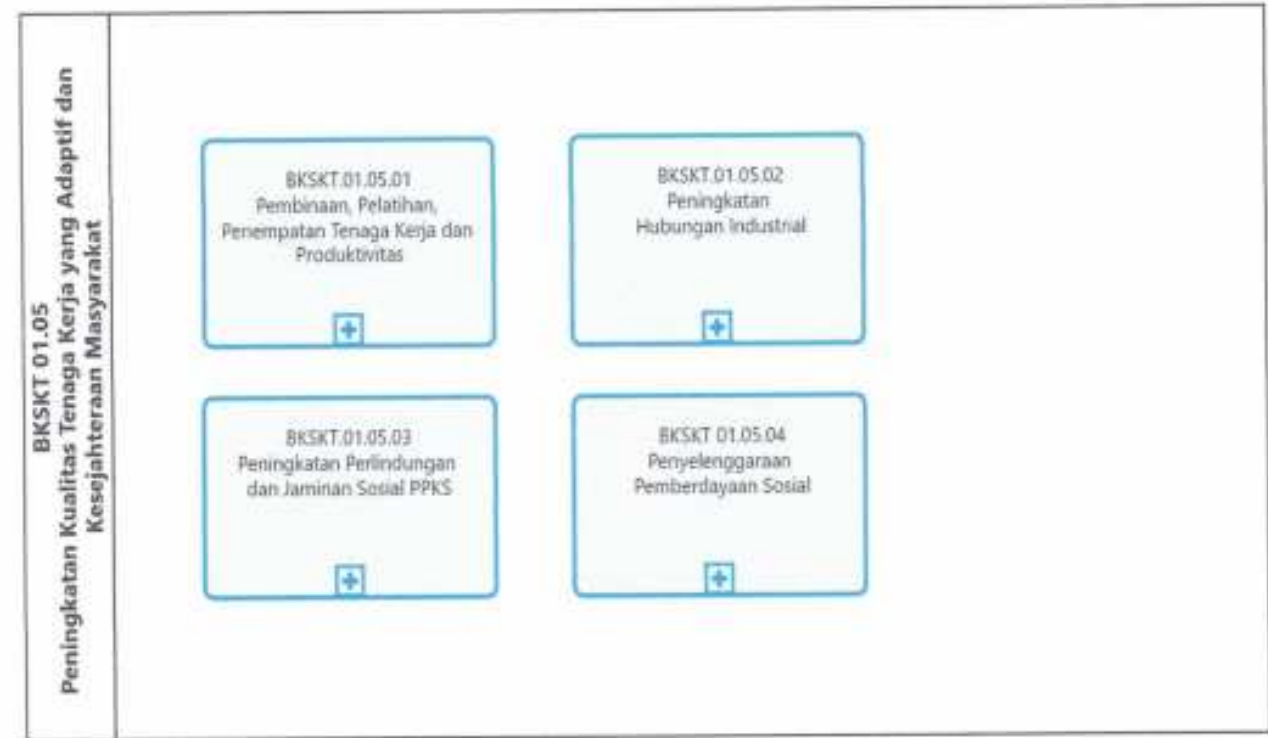
Proses Bisnis Level 2 Kota Bekasi

BKSKT 01.04



Proses Bisnis Level 2 Kota Bekasi

BKSKT 01.05

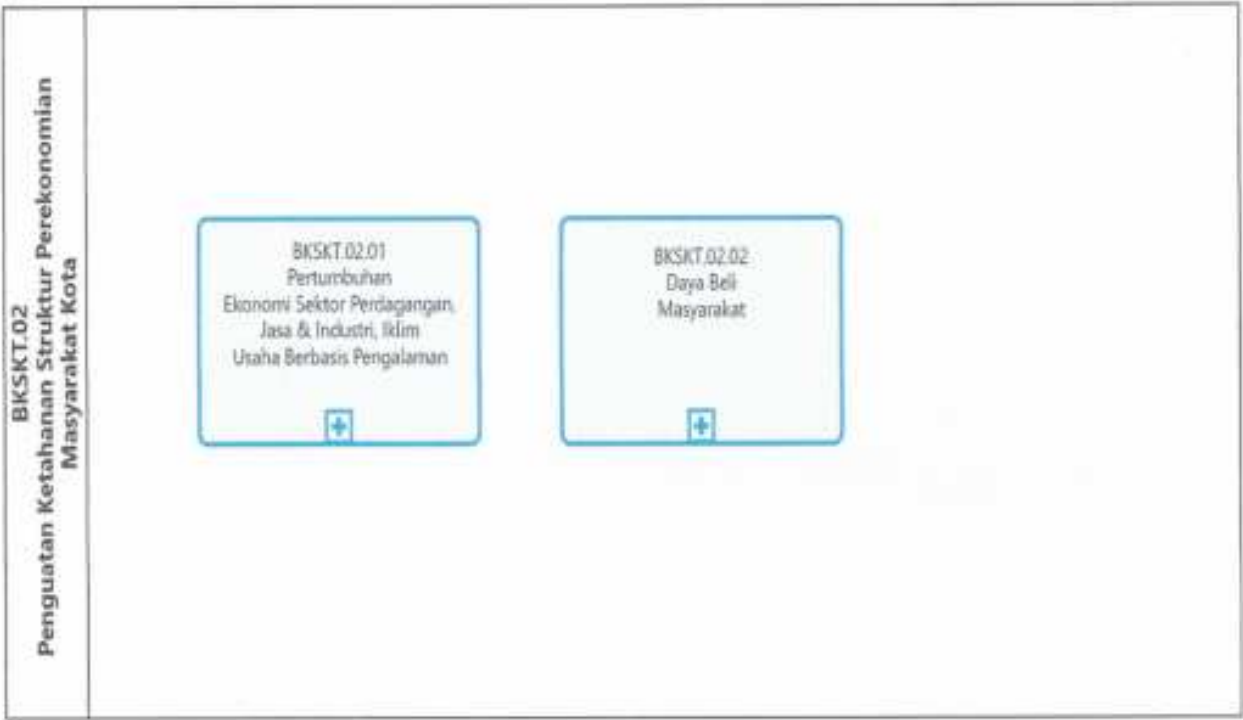


Paraf Koordinasi	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

Proses Bisnis Level 2 Kota Bekasi
BKSKT 01.06



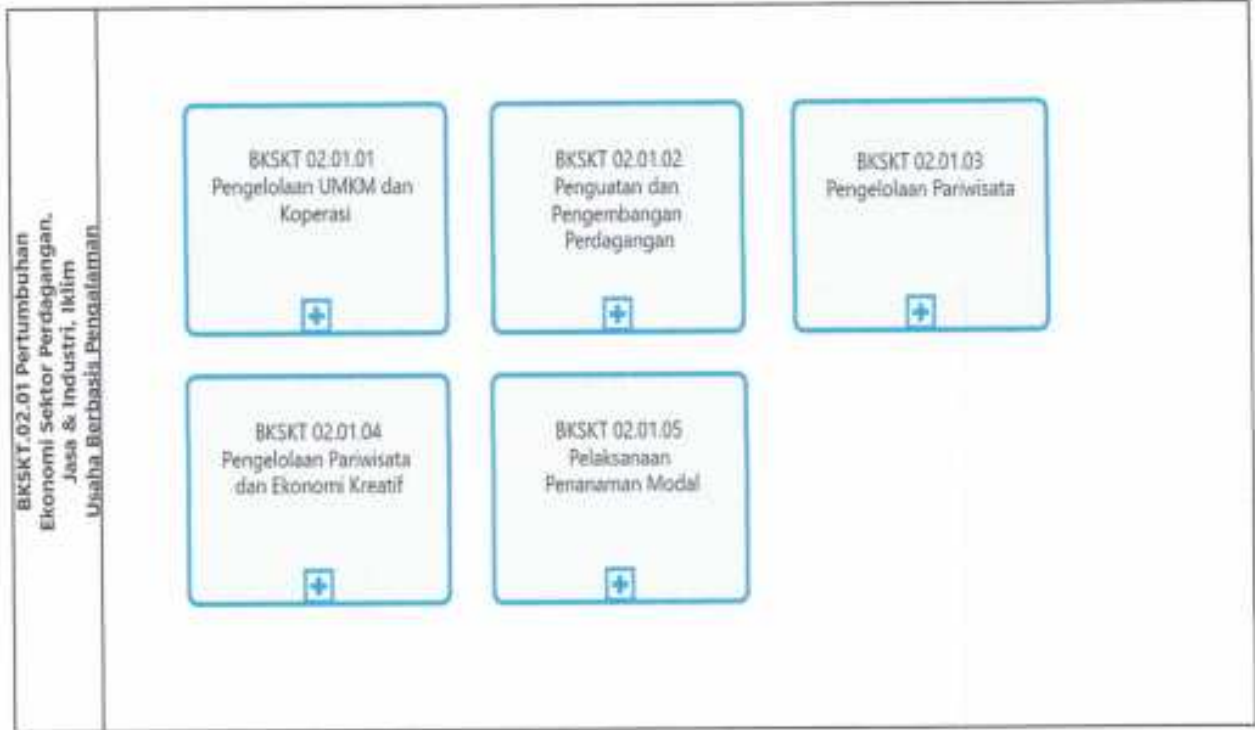
Proses Bisnis Level 1 Kota Bekasi
BKSKT 02



Paraf Koordinasi	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

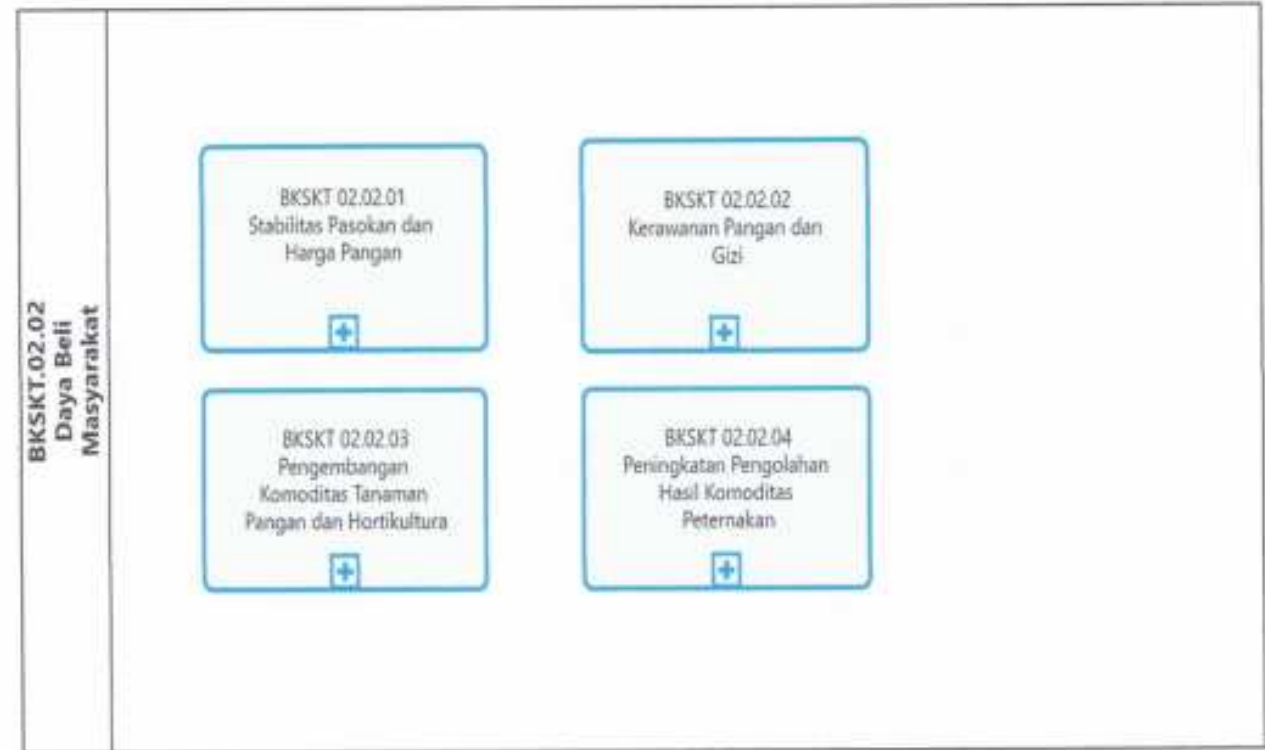
Proses Bisnis Level 2 Kota Bekasi

BKSKT 02.01



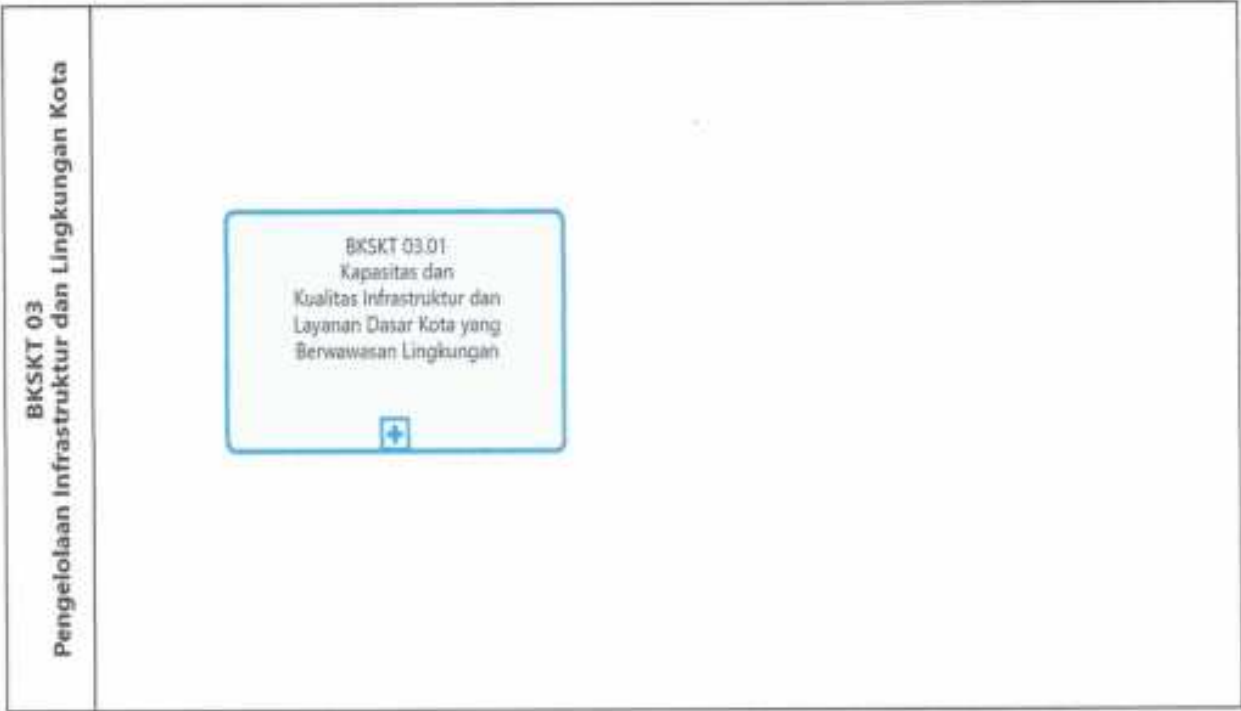
Proses Bisnis Level 2 Kota Bekasi

BKSKT 02.02

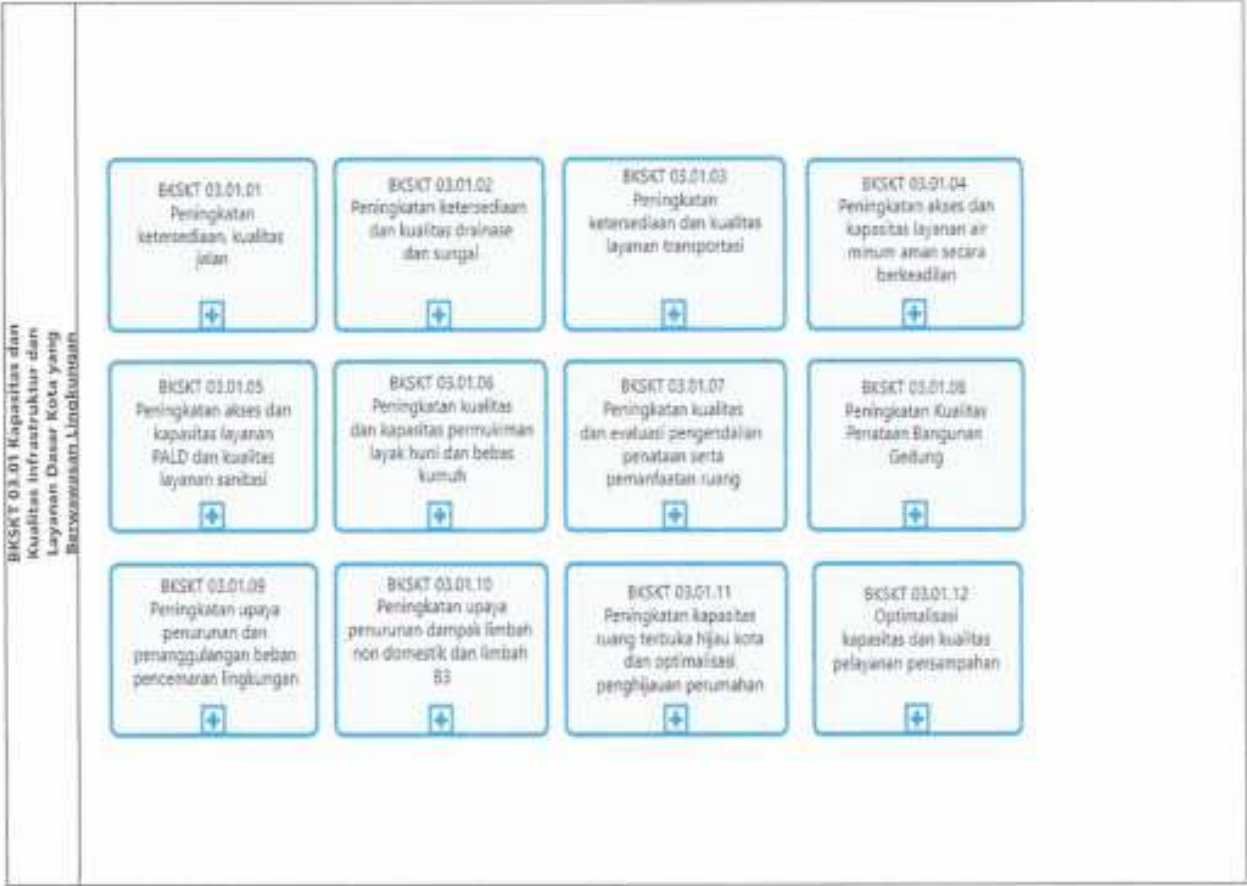


Paraf Koordinasi	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

Proses Bisnis Level 1 Kota Bekasi
BKSKT 03



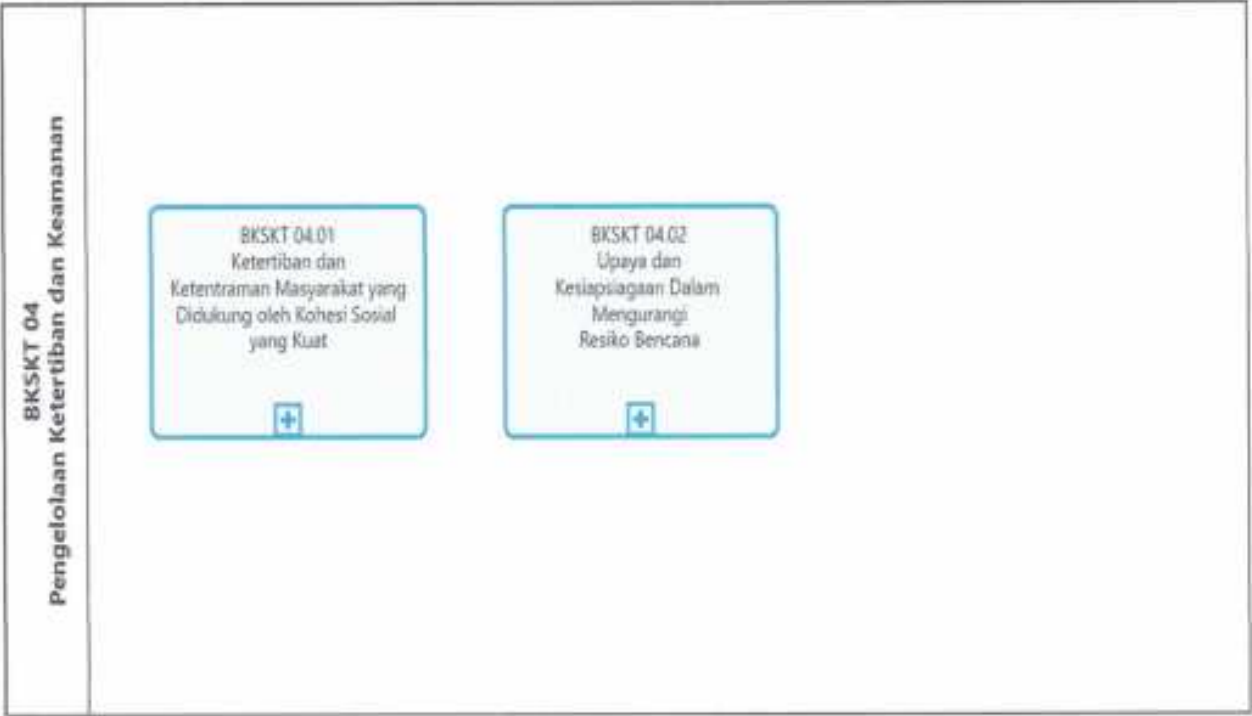
Proses Bisnis Level 2 Kota Bekasi
BKSKT 03.01



Paraf Koordinasi	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

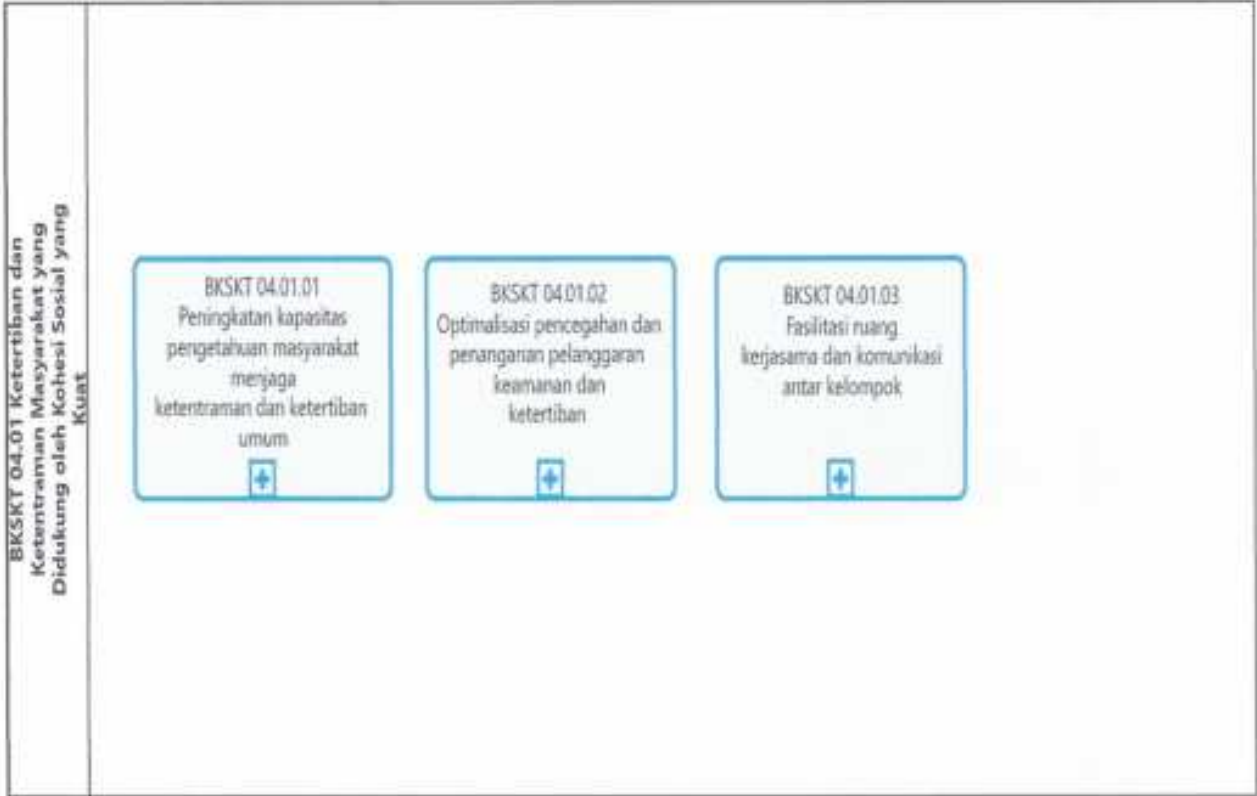
Proses Bisnis Level 1 Kota Bekasi

BKSKT 04



Proses Bisnis Level 2 Kota Bekasi

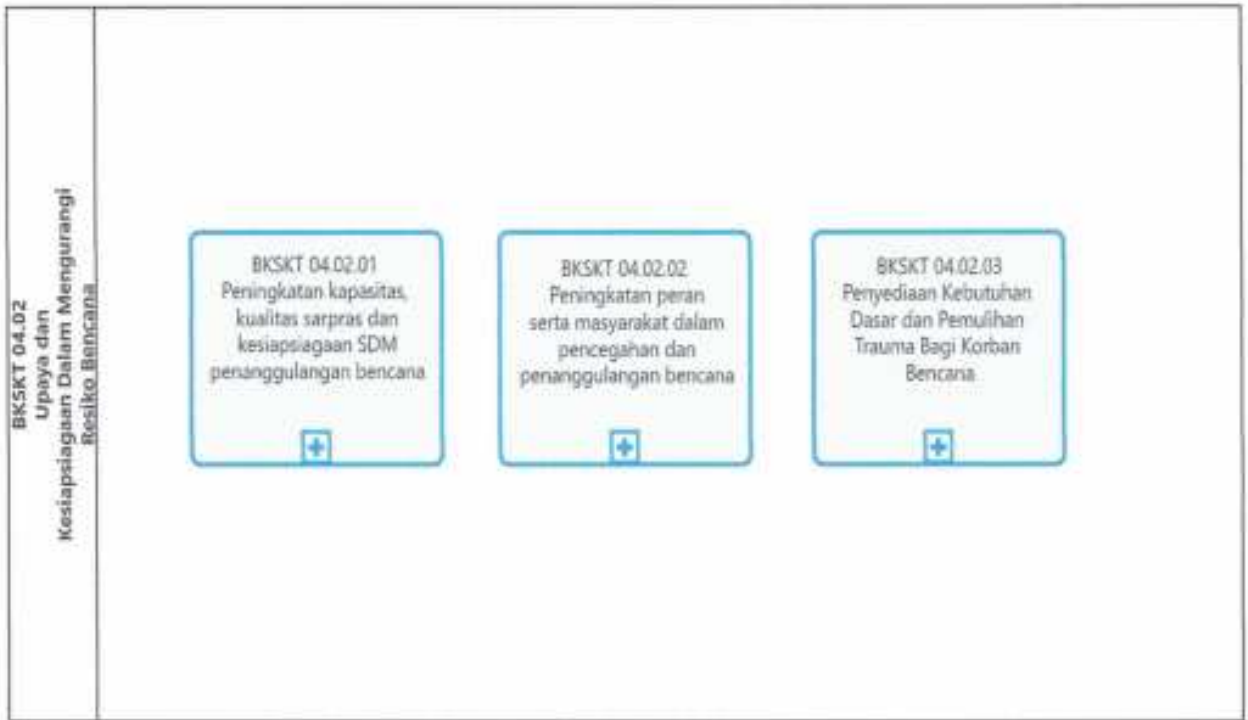
BKSKT 04.01



Paraf Koordinasi	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

Proses Bisnis Level 2 Kota Bekasi

BKSKT 04.02



Proses Bisnis Level 1 Kota Bekasi

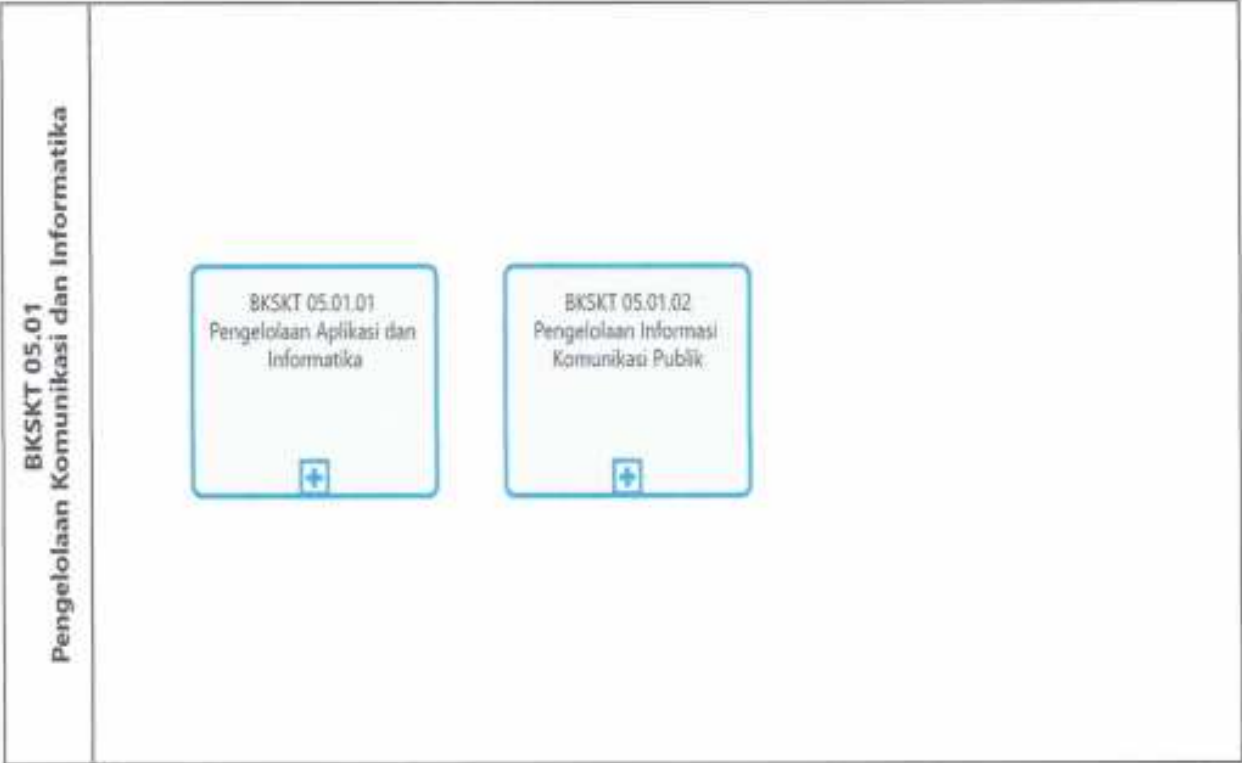
BKSKT 05



Paraf Koordinasi	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

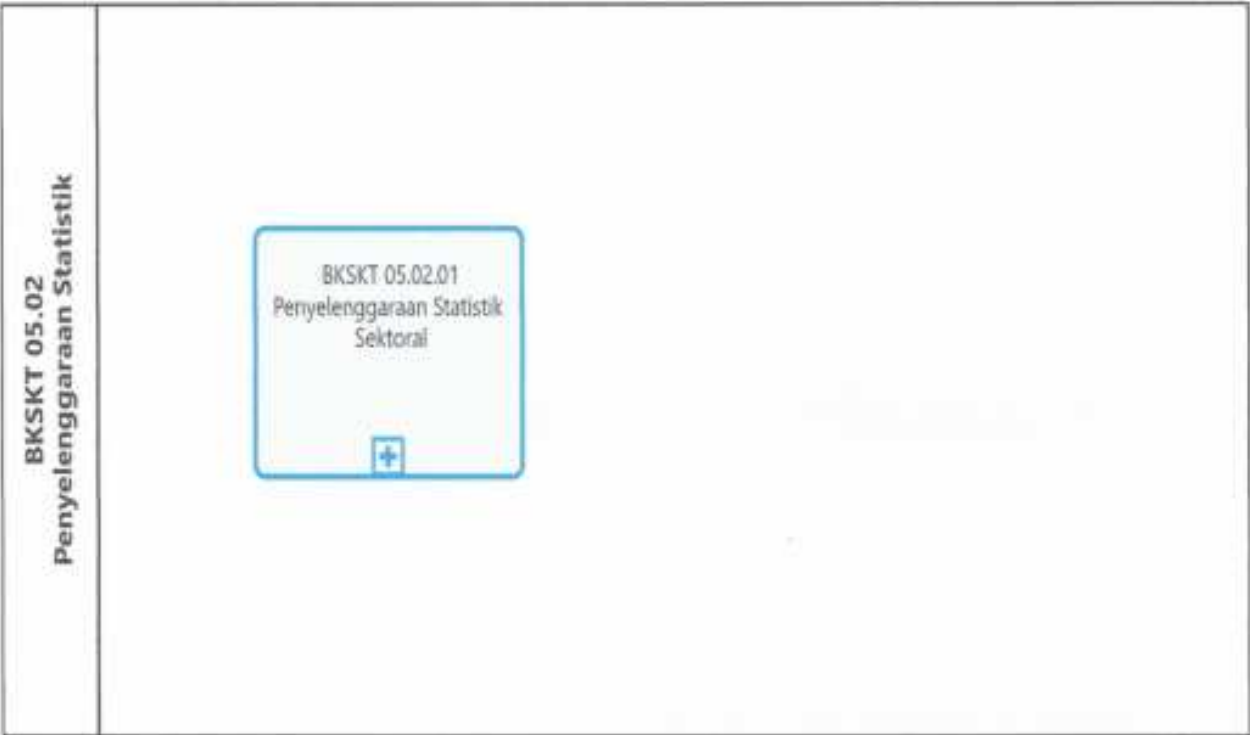
Proses Bisnis Level 2 Kota Bekasi

BKSKT 05.01



Proses Bisnis Level 2 Kota Bekasi

BKSKT 05.02



Paraf Koordinasi	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

Proses Bisnis Level 2 Kota Bekasi

BKSKT 05.03

BKSKT 05.03 Pengelolaan Persandian	BKSKT 05.03.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
---	--

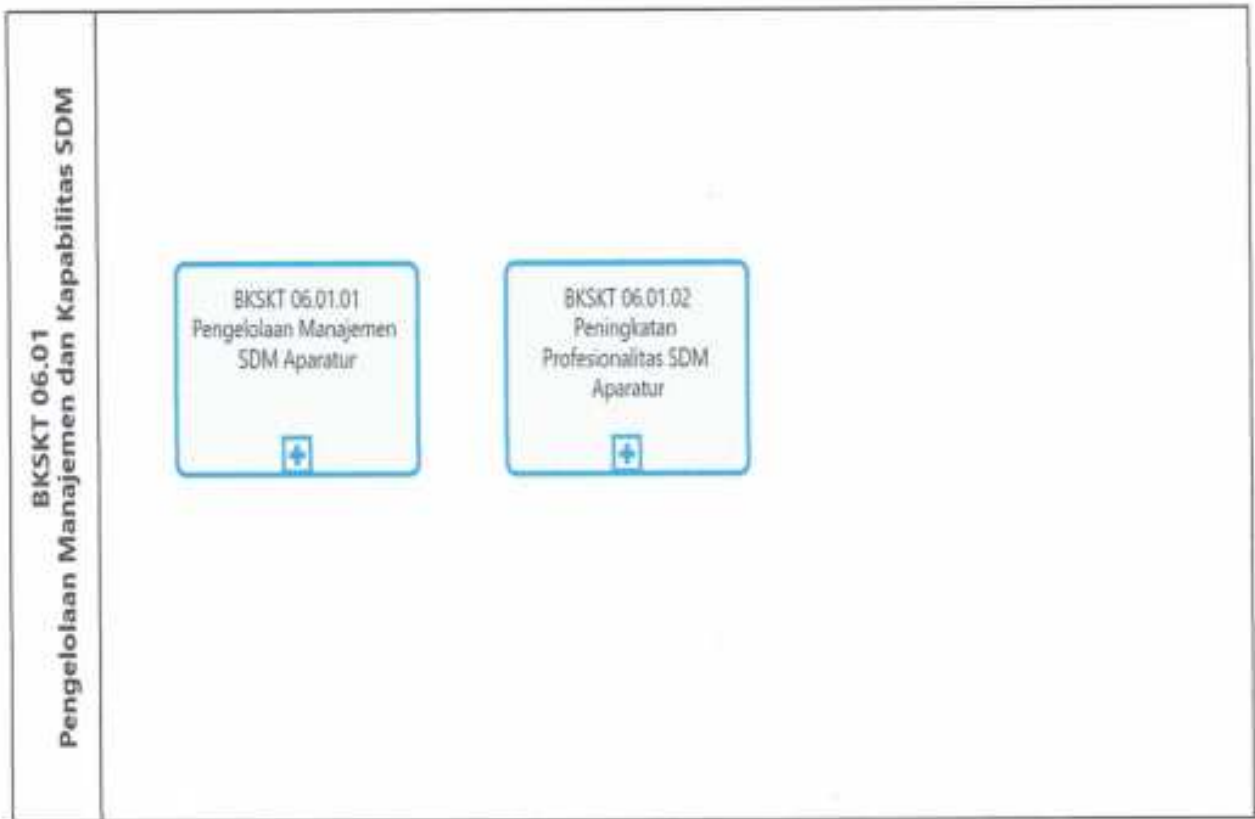
Proses Bisnis Level 1 Kota Bekasi

BKSKT 06

BKSKT.06 Pengelolaan SDM Aparatur	BKSKT 06.01 Pengelolaan Manajemen dan Kapabilitas SDM Aparatur
--	--

Paraf Koordinasi	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

Proses Bisnis Level 2 Kota Bekasi
BKSKT 06.01

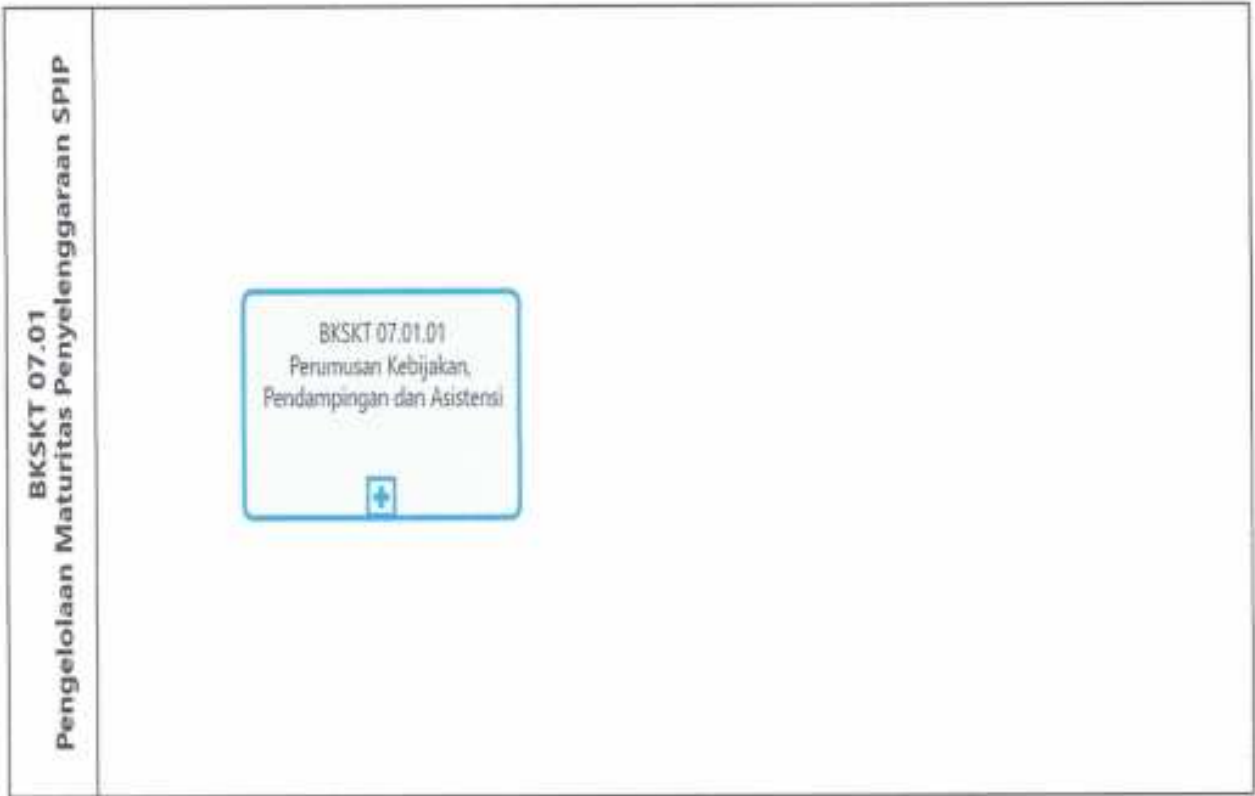


Proses Bisnis Level 1 Kota Bekasi
BKSKT 07

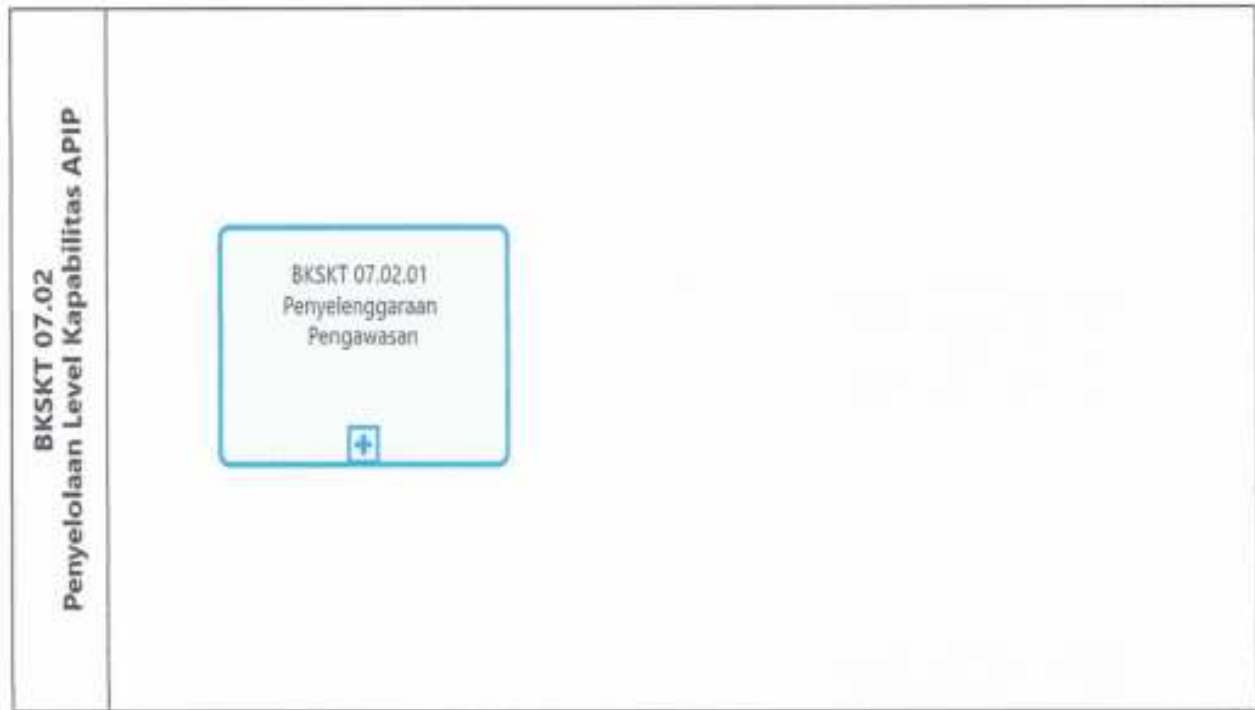


Paraf Koordinasi	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

BKSKT 07.01



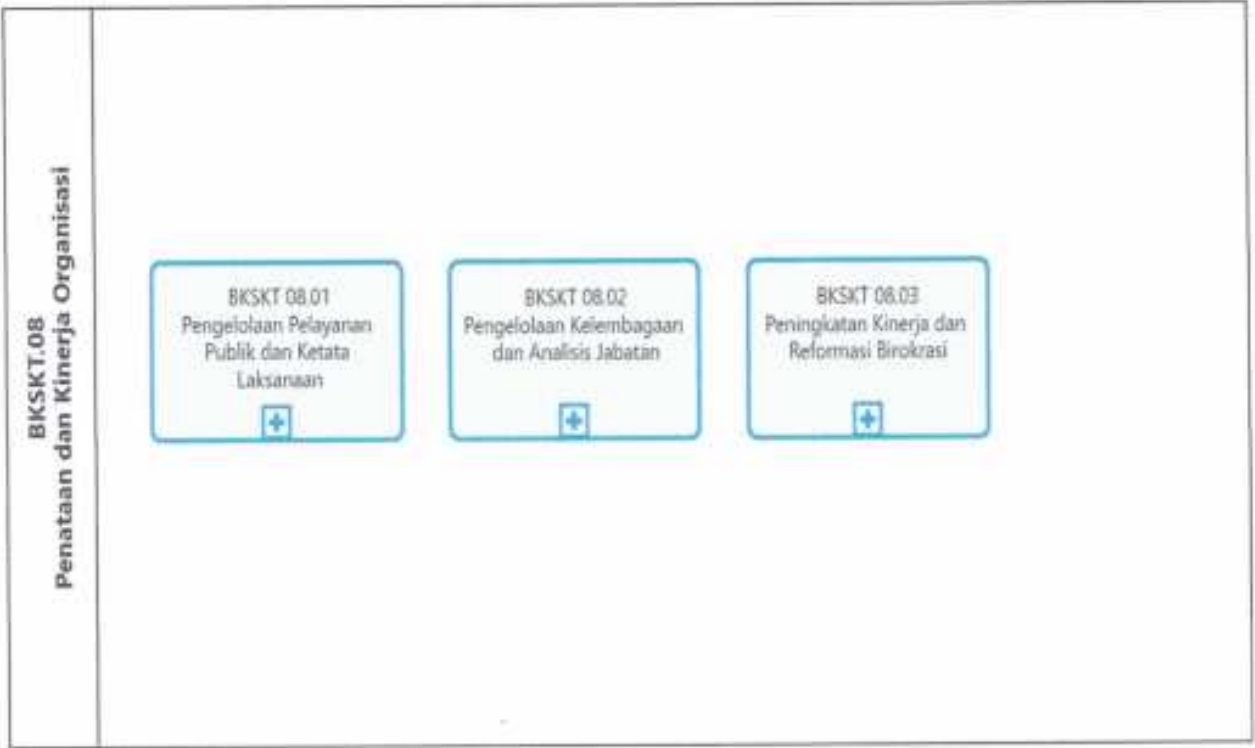
BKSKT 07.02



Paraf Koordinasi	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

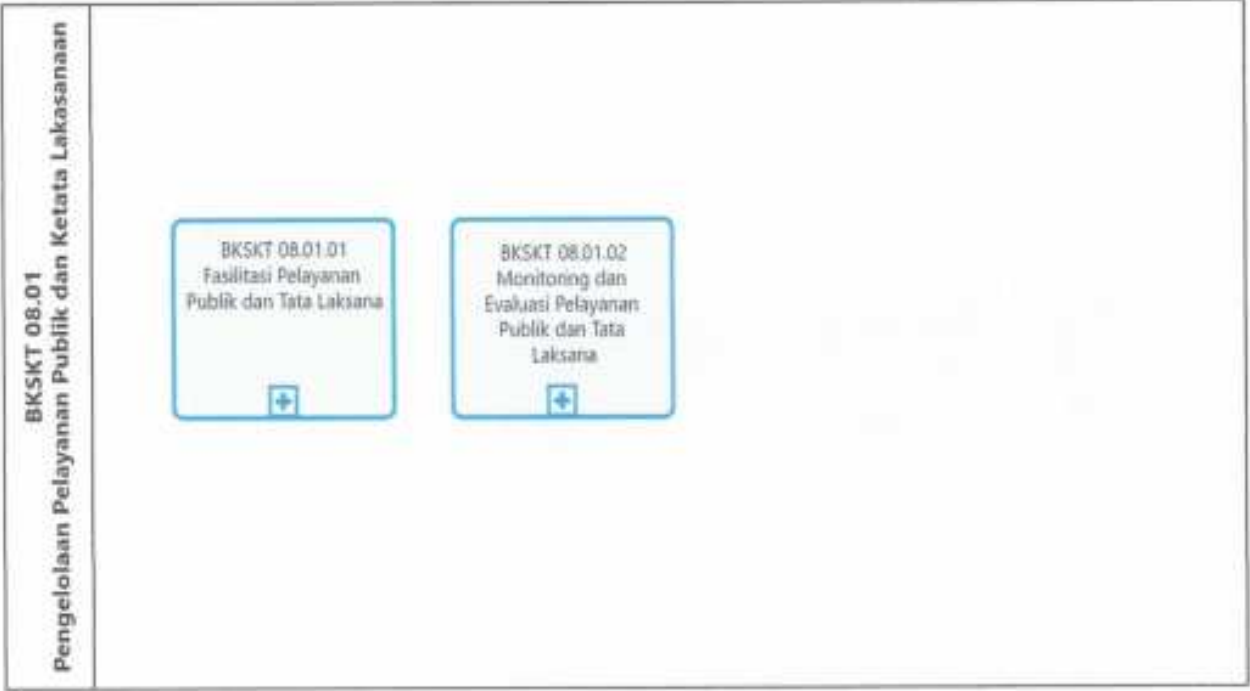
Proses Bisnis Level 1 Kota Bekasi

BKSKT 08



Proses Bisnis Level 2 Kota Bekasi

BKSKT 08.01

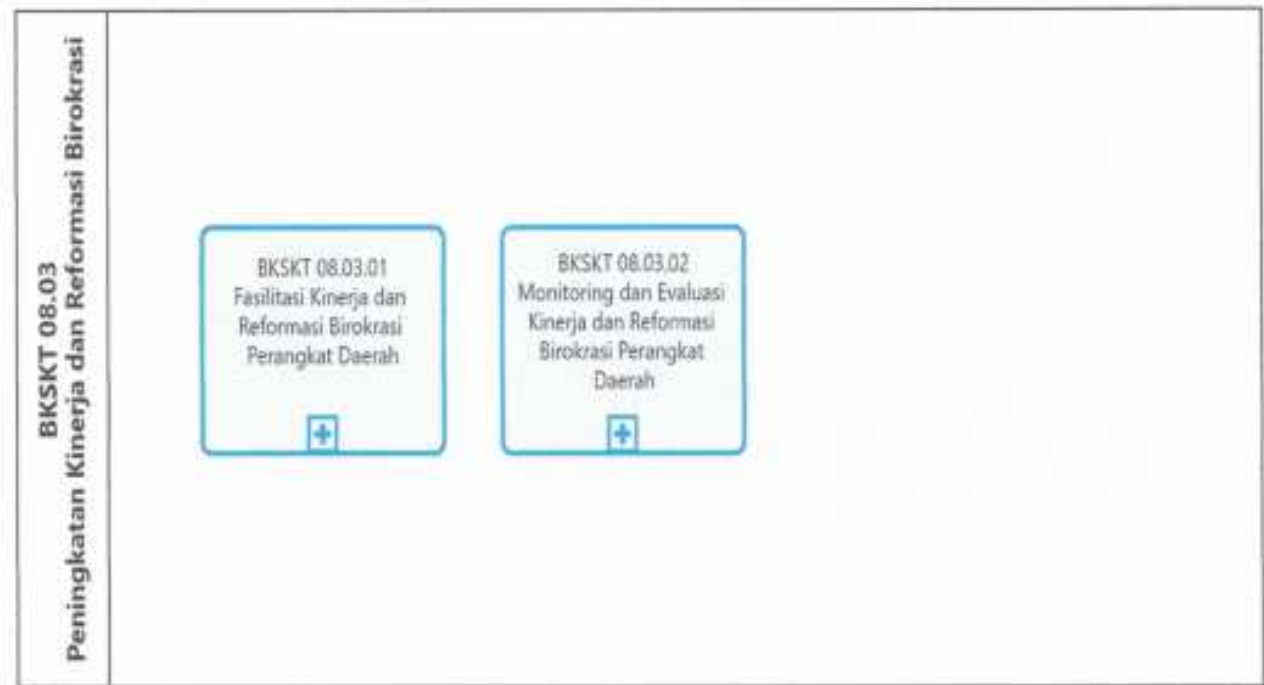


Paraf Koordinasi	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

Proses Bisnis Level 2 Kota Bekasi
BKSKT 08.02



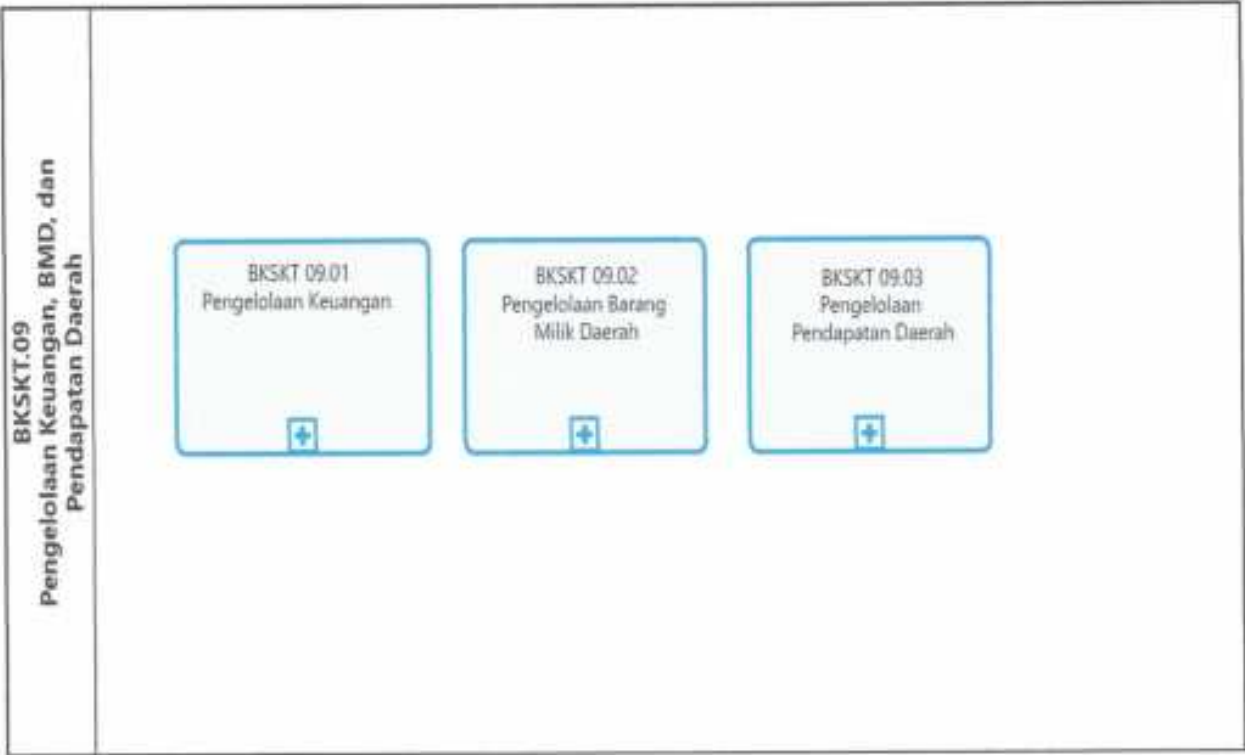
Proses Bisnis Level 2 Kota Bekasi
BKSKT 08.03



Paraf Koordinasi	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

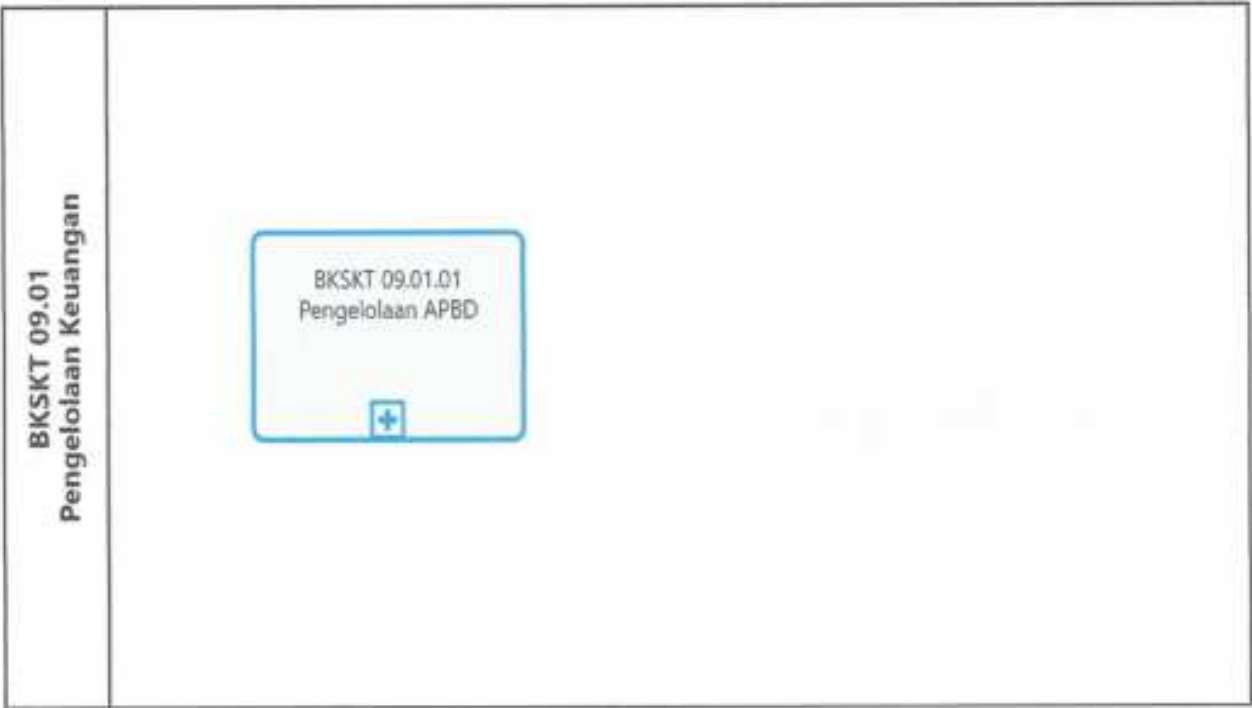
Proses Bisnis Level 1 Kota Bekasi

BKSKT 09



Proses Bisnis Level 2 Kota Bekasi

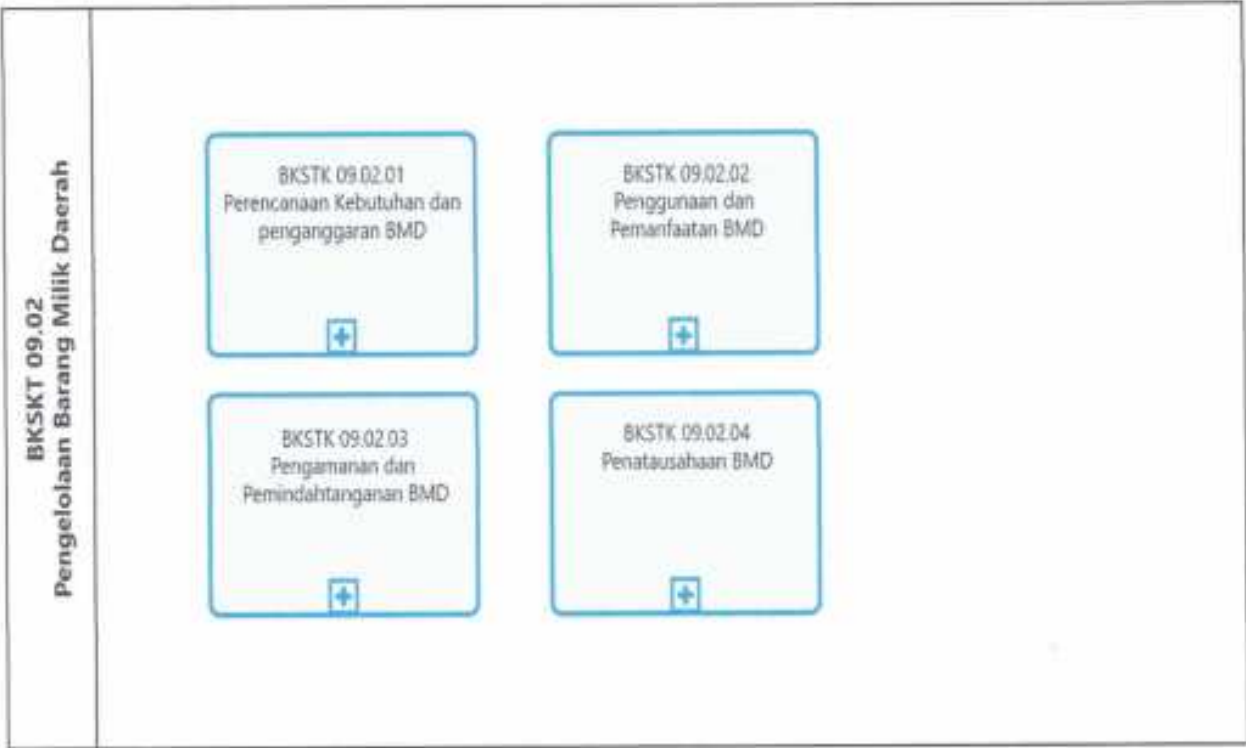
BKSKT 09.01



Paraf Koordinasi	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

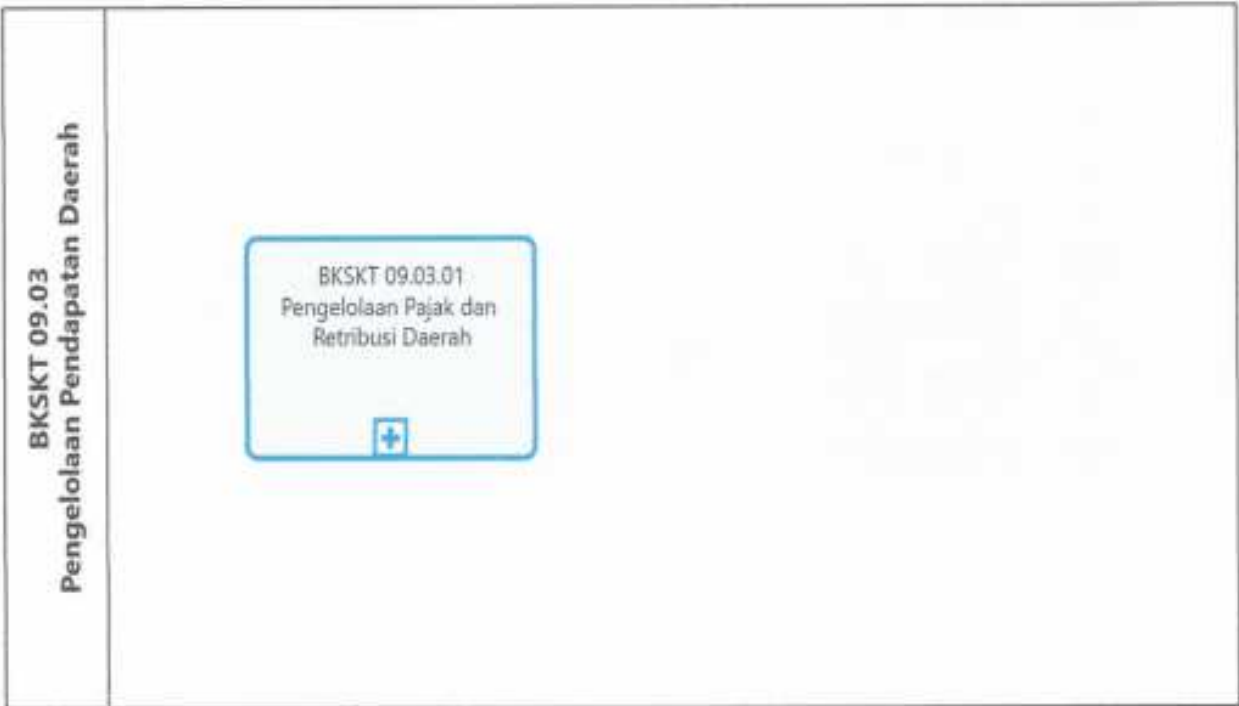
Proses Bisnis Level 2 Kota Bekasi

BKSKT 09.02



Proses Bisnis Level 2 Kota Bekasi

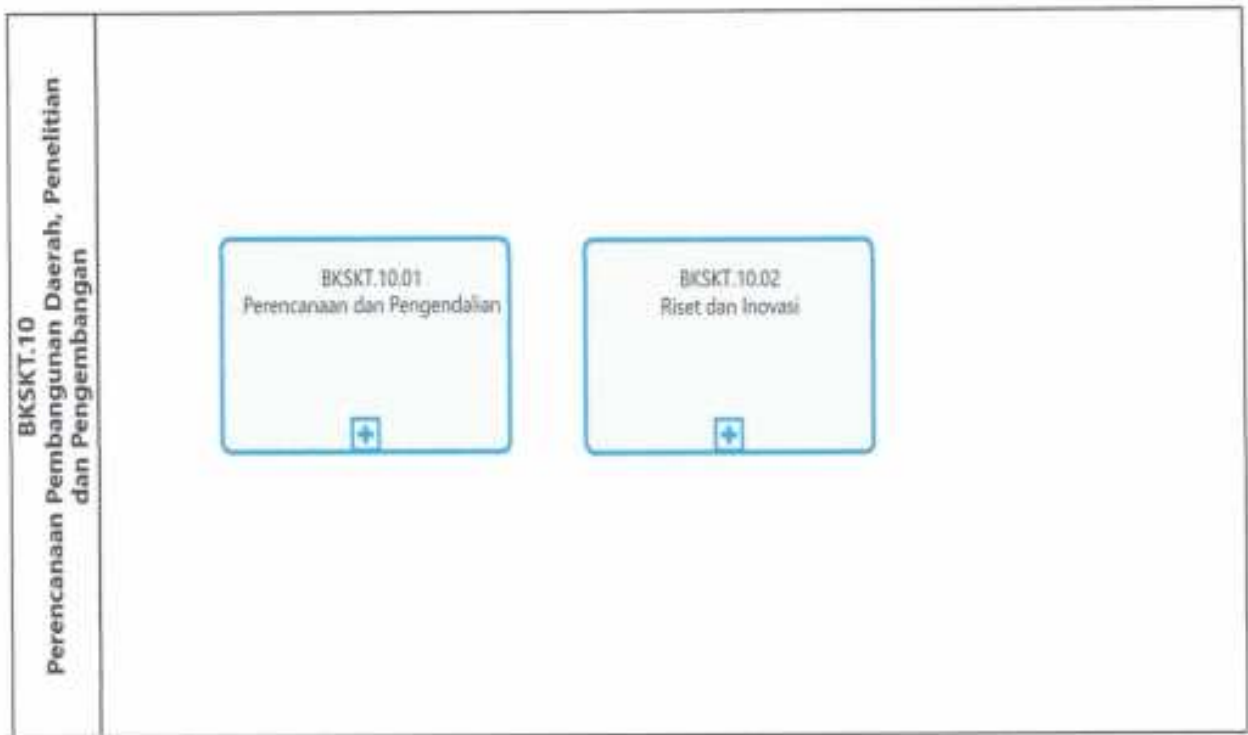
BKSKT 09.03



Paraf Koordinasi	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

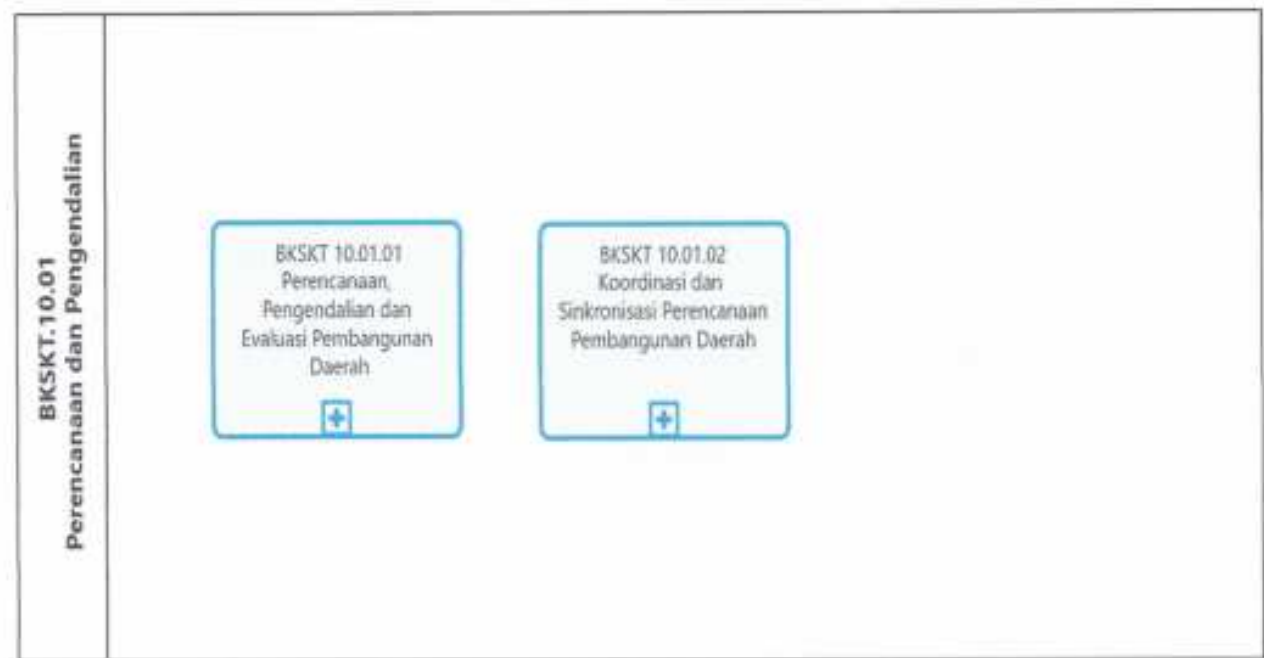
Proses Bisnis Level 1 Kota Bekasi

BKSKT 10



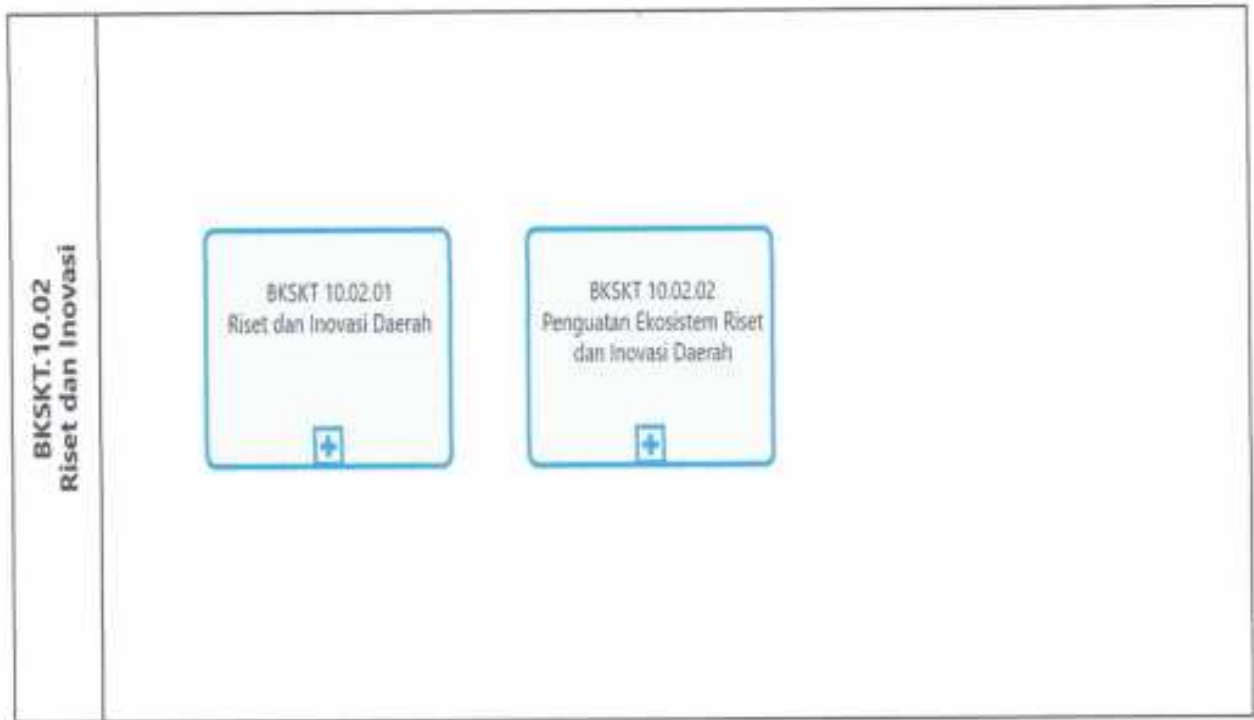
Proses Bisnis Level 2 Kota Bekasi

BKSKT 10.01

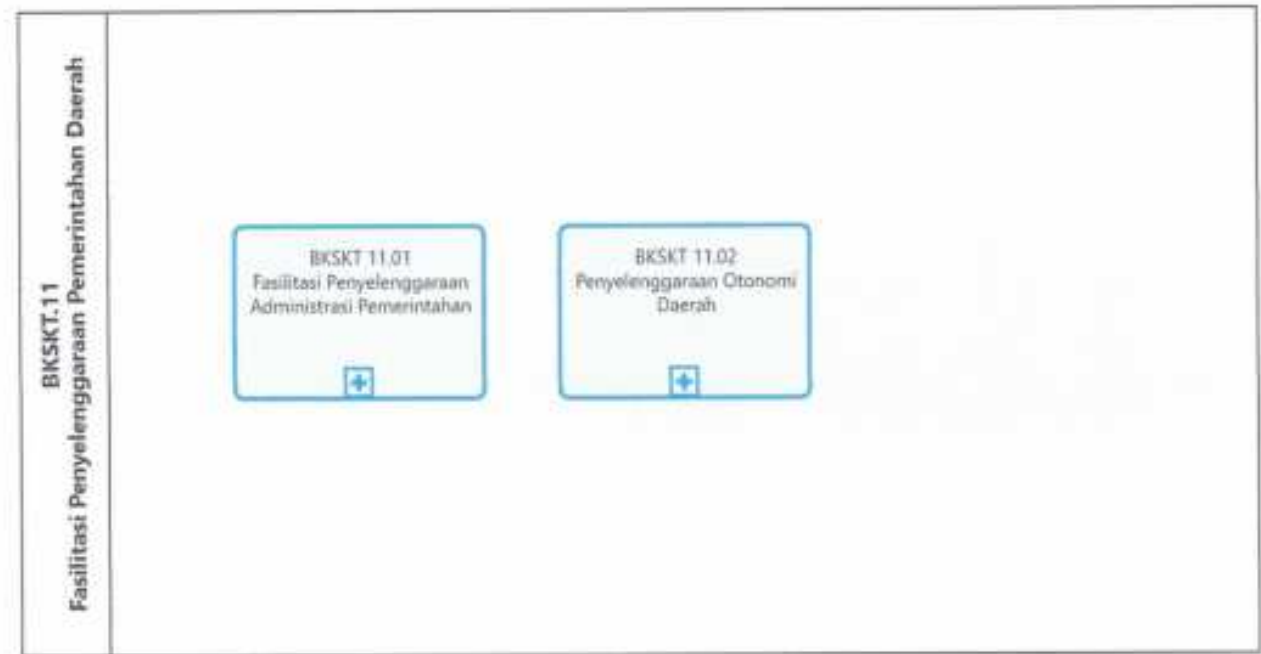


Paraf Koordinasi	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

Proses Bisnis Level 2 Kota Bekasi
BKSKT 10.02



Proses Bisnis Level 1 Kota Bekasi
BKSKT 11



Paraf Koordinasi	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

Proses Bisnis Level 2 Kota Bekasi
BKSKT 11.01



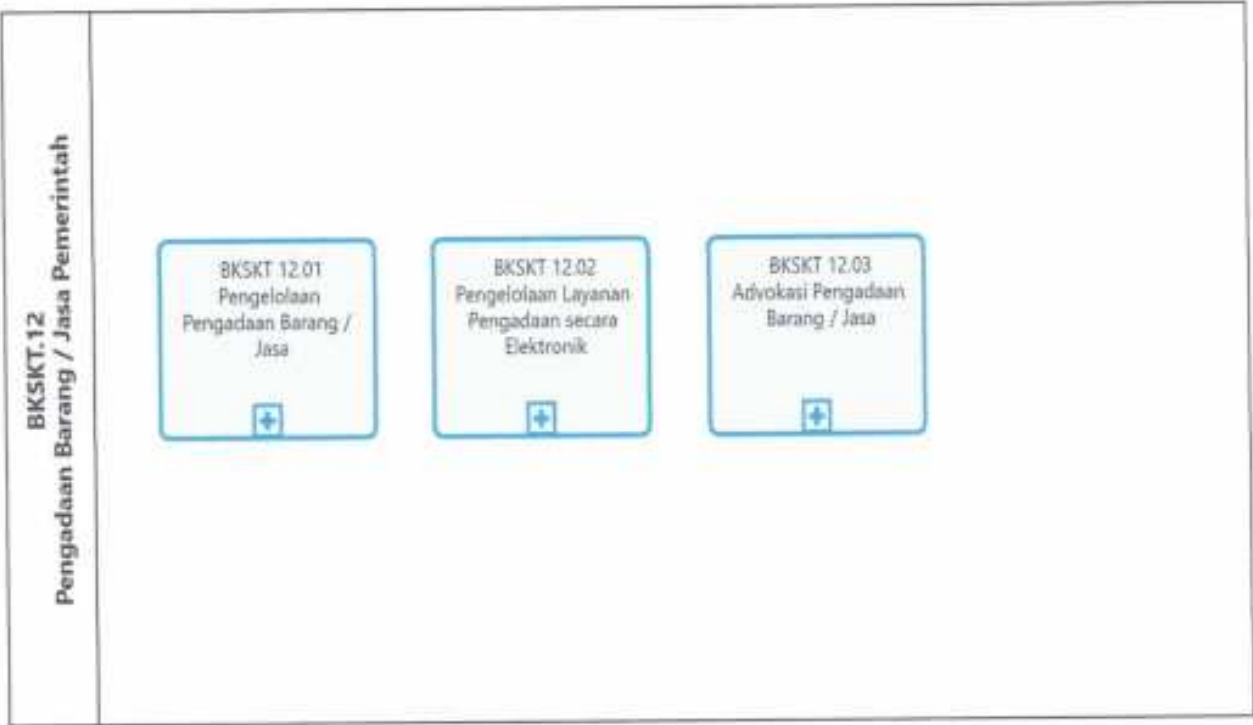
Proses Bisnis Level 2 Kota Bekasi
BKSKT 11.02



Paraf Koordinasi	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

Proses Bisnis Level 1 Kota Bekasi

BKSKT 12



Proses Bisnis Level 2 Kota Bekasi

BKSKT 12.01



Paraf Koordinasi	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

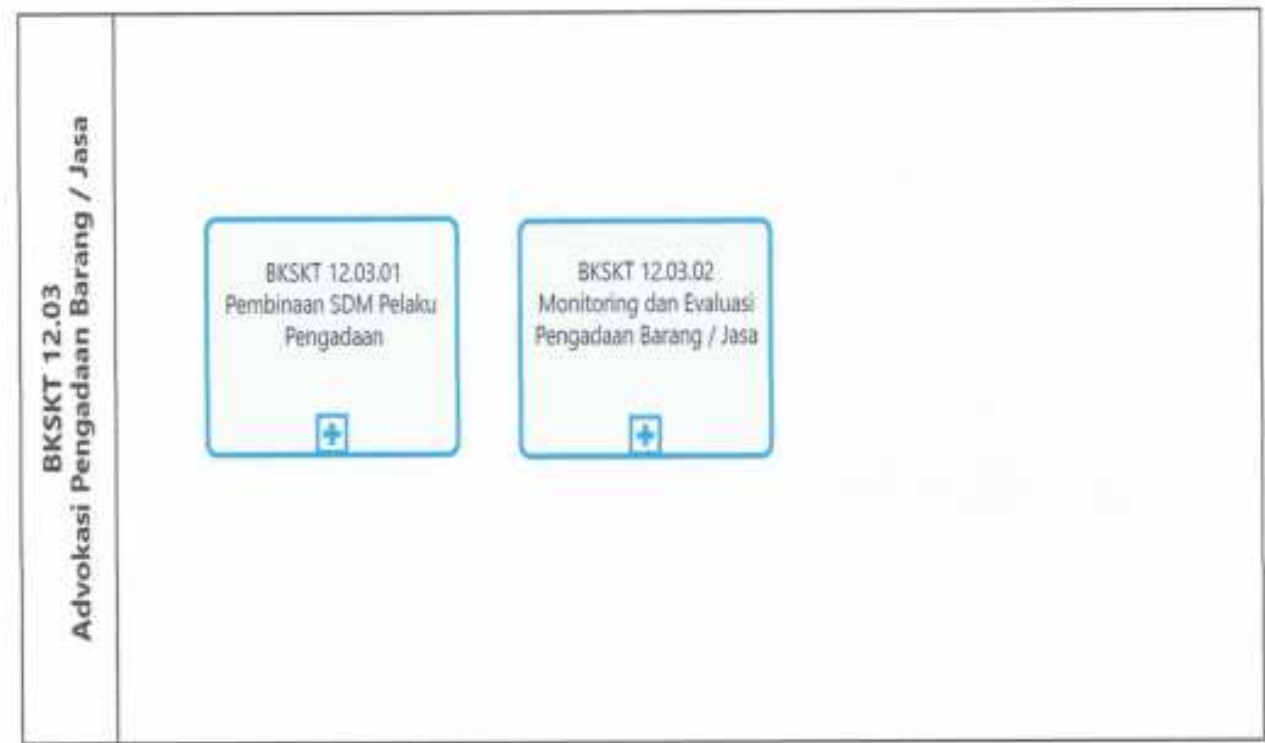
Proses Bisnis Level 2 Kota Bekasi

BKSKT 12.02



Proses Bisnis Level 2 Kota Bekasi

BKSKT 12.03



Paraf Koordinasi	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

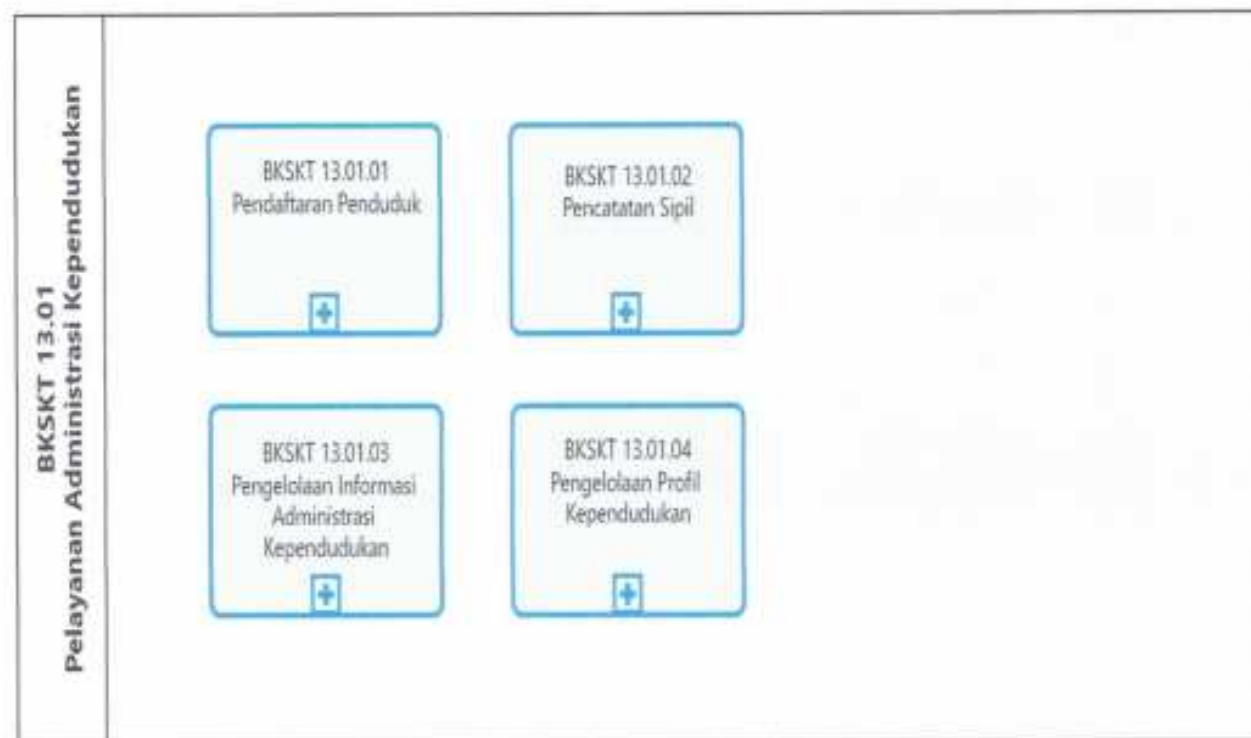
Proses Bisnis Level 1 Kota Bekasi

BKSKT 13



Proses Bisnis Level 2 Kota Bekasi

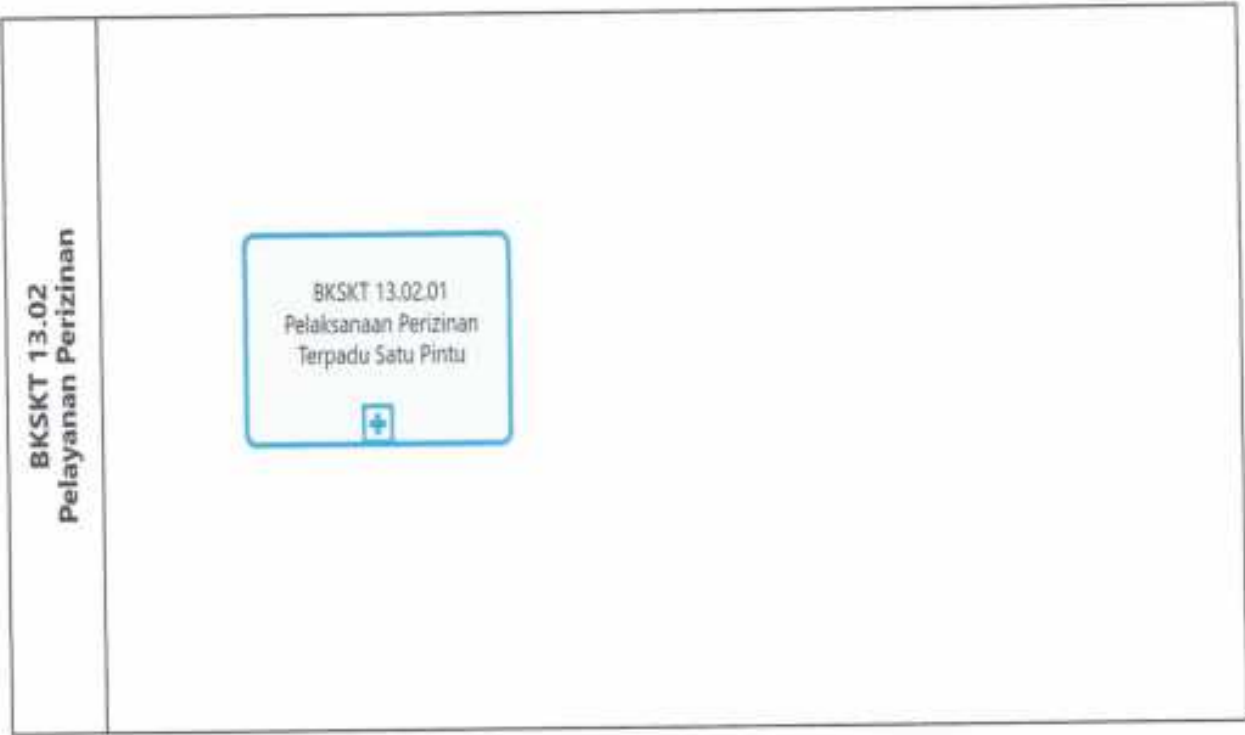
BKSKT 13.01



Paraf Koordinasi	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

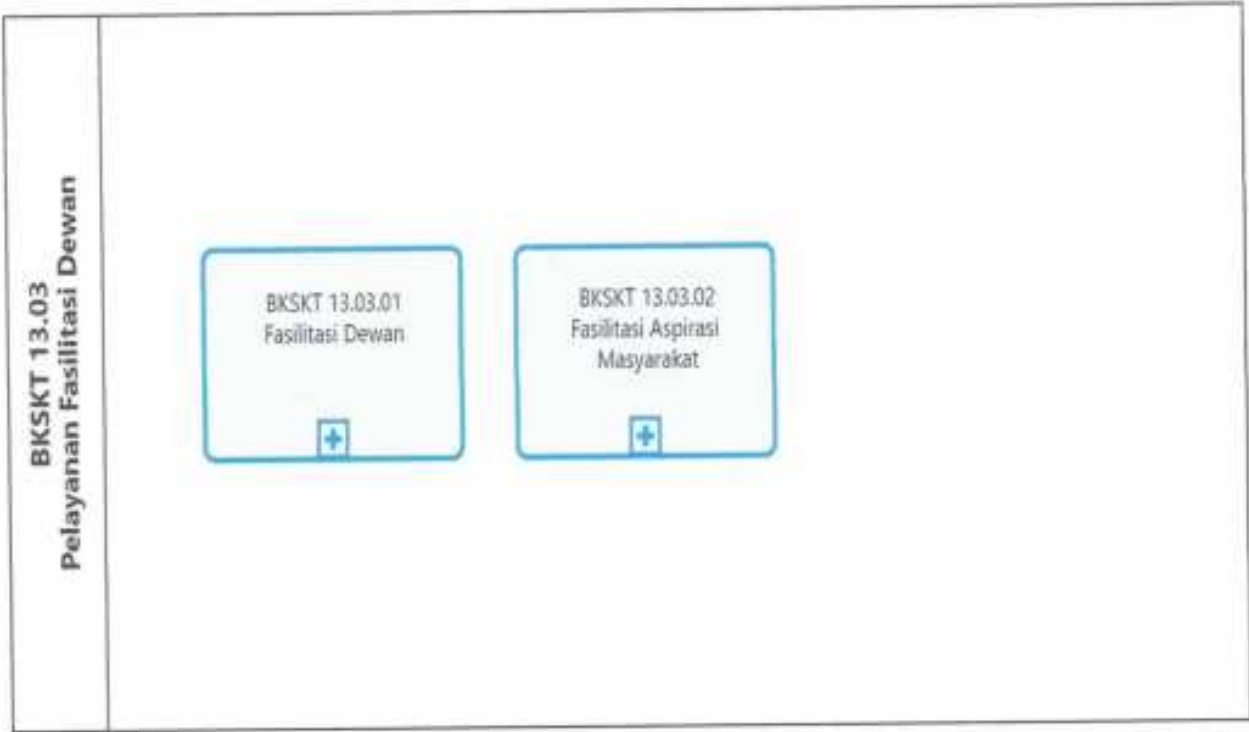
Proses Bisnis Level 2 Kota Bekasi

BKSKT 13.02



Proses Bisnis Level 2 Kota Bekasi

BKSKT 13.03



Paraf Koordinasi	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

Proses Bisnis Level 2 Kota Bekasi
BKSKT 13.04

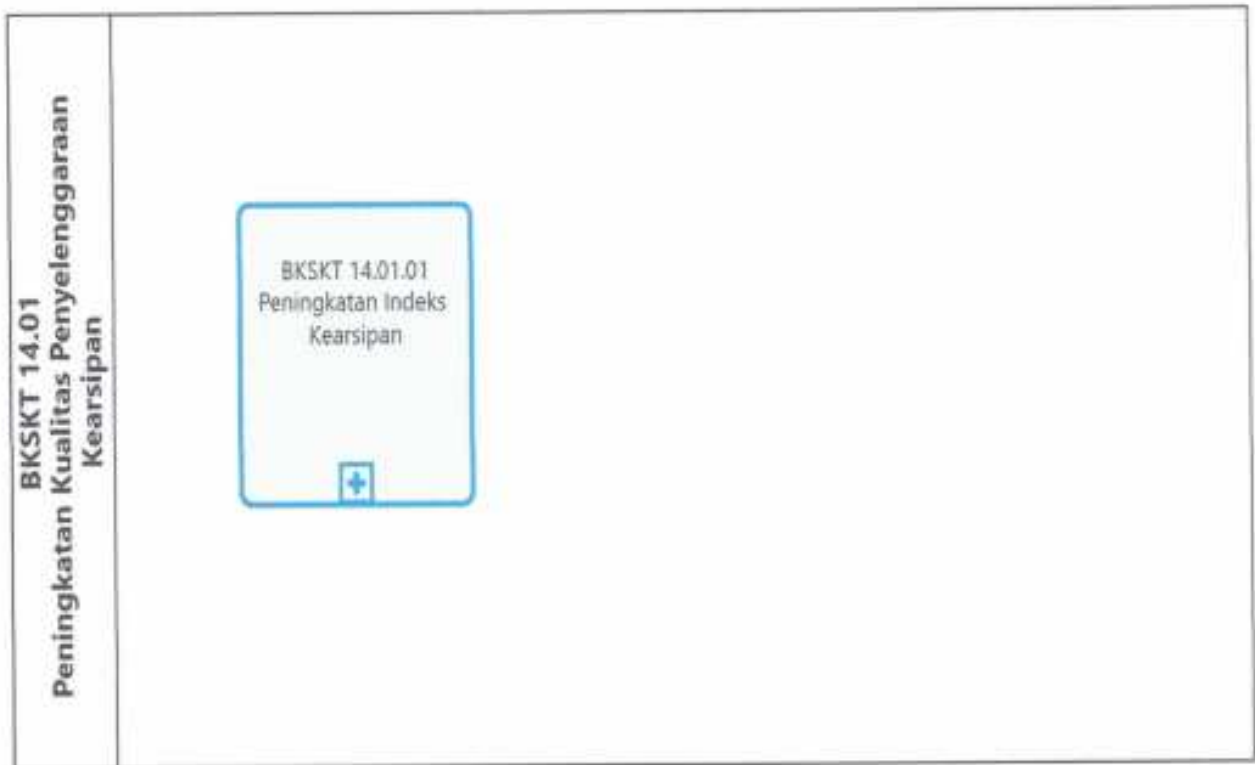
BKSKT 13.04 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	BKSKT 13.04.01 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Wilayah Kecamatan
---	---

Proses Bisnis Level 1 Kota Bekasi
BKSKT 14

BKSKT.14 Penyelenggaraan Kearsipan	BKSKT 14.01 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan
---	---

Paraf Koordinasi	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

Proses Bisnis Level 2 Kota Bekasi
BKSKT 14.01



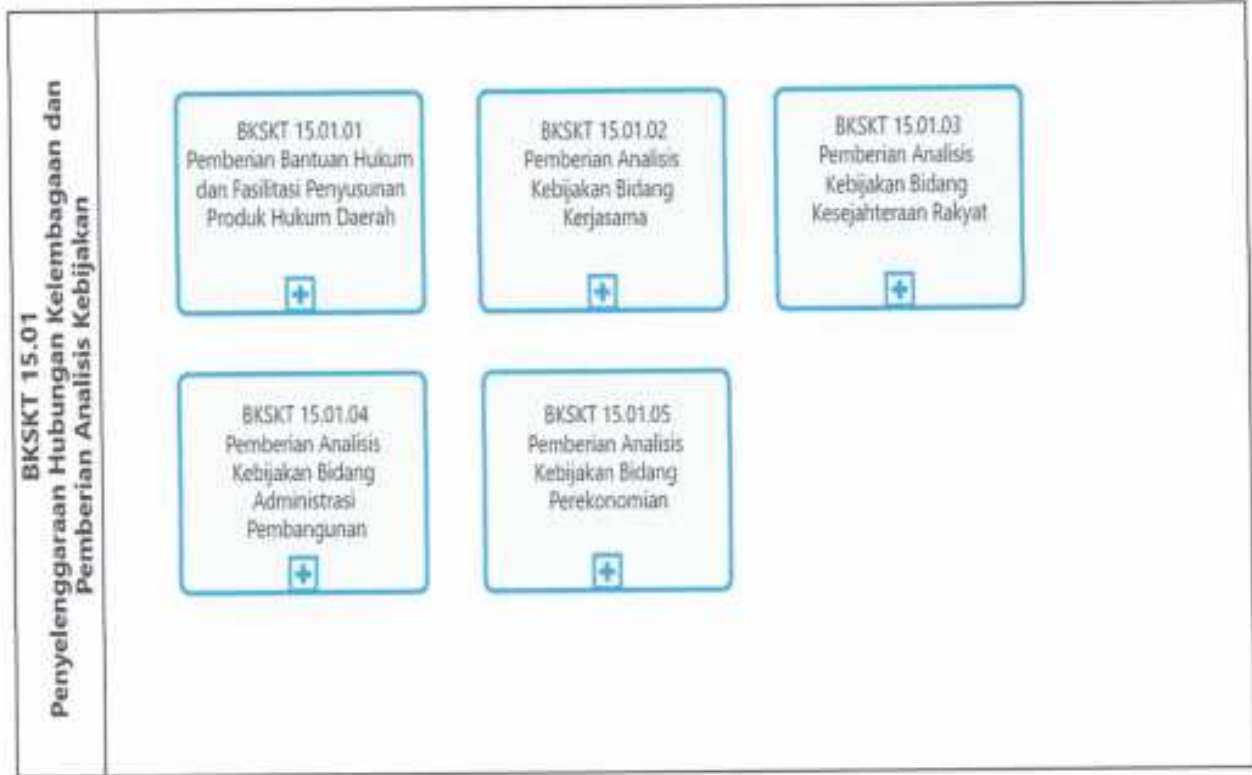
Proses Bisnis Level 1 Kota Bekasi
BKSKT 15



Paraf Koordinasi	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

Proses Bisnis Level 2 Kota Bekasi

BKSKT 15.01



Proses Bisnis Level 2 Kota Bekasi

BKSKT 15.02



Paraf Koordinasi	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

BKSKT 15.03 Dukungan Teknis dan Administrasi	BKSKT 15.03.01 Penyelenggaraan Ketatausahaan +
--	---

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

Pj.WALI KOTA BEKASI,



R. GANI MUHAMAD



MATRIKS LEVEL DAN PENGAMPU

LEVEL 0		LEVEL 1		LEVEL 2		PENGAMPU
P.1	Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas Secara Berkeadilan	P.1.1	Peningkatan Kualitas Pengetahuan Masyarakat	P.1.1.1	Pengelolaan Pendidikan yang Merata dan Berkualitas	Dinas Pendidikan
				P.1.1.2	Peningkatan Kegemaran Minat Membaca Masyarakat	Dinas Pendidikan
		P.1.2	Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	P.1.2.1	Pengelolaan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Dinas Kesehatan
				P.1.2.2	Penyediaan dan Pengawasan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman	Dinas Kesehatan
				P.1.2.3	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
				P.1.2.4	Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Dinas Kesehatan
		P.1.3	Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dan Pembangunan Responsif Gender	P.1.3.1	Pengendalian, Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	DPPKB
				P.1.3.2	Pengelolaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DPPKB

Paraf Koordinasi	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

LEVEL 0		LEVEL 1		LEVEL 2		PENGAMPU
	P.1.4	Peningkatan Nilai Masyarakat	P.1.4.1	Pengelolaan Kebudayaan	Disparbud	
			P.1.4.2	Peningkatan Kualitas Perpustakaan	Disarpusda	
	P.1.5	Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja yang Adaptif dan Kesejahteraan Masyarakat Kota	P.1.5.1	Pembinaan, Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Produktifitas	Disnaker	
			P.1.5.2	Peningkatan Hubungan Industrial	Disnaker	
			P.1.5.3	Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial PPKS	Dinsos	
			P.1.5.4	Penyelenggaraan Pemberdayaan Sosial	Dinsos	
	P.1.6	Peningkatan Peran Pemuda dan Olahraga	P.1.6.1	Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda	Dispora	
			P.1.6.2	Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	Dispora	
	P.2	Penguatan Ketahanan Struktur Perekonomian Masyarakat Kota	P.2.1	Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan, Jasa dan Industri, Iklim Usaha Berbasis Pengalaman	Diskop UKM	
			P.2.1.1	Penguatan dan Pengembangan Perdagangan	Disdagperin	
		P.2.1.2	Penguatan dan Pengembangan Perdagangan	Disdagperin		
		P.2.1.3	Pengelolaan Pariwisata	Disparbud		
		P.2.1.4	Pengelolaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Disparbud		
		P.2.1.5	Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP		

Paraf Koordinasi	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

LEVEL 0		LEVEL 1		LEVEL 2		PENGAMPU
P.3	Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Kota	P.2.2	Daya Beli Masyarakat	P.2.2.1	Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	DKPPP
				P.2.2.2	Kerawanan Pangan dan Gizi	DKPPP
				P.2.2.3	Pengembangan Komoditas Tanaman Pangan dan Holtikultura	DKPPP
				P.2.2.4	Peningkatan Pengolahan Hasil Komoditas Peternakan	DKPPP
				P.3.1.1	Peningkatan Ketersediaan Kualitas Jalan	DBMSDA
		P.3.1	Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Kota yang Berwawasan Lingkungan	P.3.1.2	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Drainase dan Sungai	DBMSDA
				P.3.1.3	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Layanan Transportasi	Dishub
				P.3.1.4	Peningkatan Akses dan Kapasitas Layanan Air Minum Aman Secara Berkeadilan	DPKPP
				P.3.1.5	Peningkatan Akses dan Kapasitas Layanan PALD dan Kualitas Layanan Sanitasi	DPKPP

Paraf Koordinasi	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

LEVEL 0		LEVEL 1		LEVEL 2		PENGAMPU
				P.3.1.6	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Permukiman Layak Huni dan Bebas Kumuh	DPKPP
				P.3.1.7	Peningkatan Kualitas dan Evaluasi Pengendalian Penataan Serta Pemanfaatan Ruang	Distaru
				P.3.1.8	Peningkatan Kualitas Penataan Bangunan Gedung	DPKPP
				P.3.1.9	Peningkatan Upaya Penurunan dan Penanggulangan Beban Pencemaran Lingkungan	Dinas LH
				P.3.1.10	Peningkatan Upaya Penurunan Dampak Limbah Non Domestik dan Limbah B3	Dinas LH
				P.3.1.11	Peningkatan Kapasitas Ruang terbuka Hijau Kota dan Optimalisasi Penghijauan Perumahan	Dinas LH
				P.3.1.12	Optimalisasi Kapasitas dan Kualitas Pelayanan Persampahan	Dinas LH

Paraf Koordinasi	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

LEVEL 0		LEVEL 1		LEVEL 2		PENGAMPU
P.4	Pengelolaan Ketertiban dan Keamanan	P.4.1	Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang Didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat	P.4.1.1	Peningkatan Kapasitas Pengetahuan Masyarakat Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP
				P.4.1.2	Optimalisasi Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban	
				P.4.1.3	Fasilitasi Ruang Kerjasama dan Komunikasi antar Kelompok	
		P.4.2	Upaya dan Kesiapsiagaan Dalam Mengurangi Resiko Bencana	P.4.2.1	Peningkatan Kapasitas Kualitas Sarpras dan Kesiapsiagaan SDM Penanggulangan Bencana	BPBD
				P.4.2.2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	
				P.4.2.3	Penyediaan Kebutuhan Dasar dan Pemulihan Trauma Bagi Korban Bencana	
P.5	Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Persandian dan Statistik	P.5.1	Pengelolaan Komunikasi dan Informatika	P.5.1.1	Pengelolaan Aplikasi dan Informatika	Diskominfostandi
				P.5.1.2	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	

Paraf Koordinasi

Kabag Organisasi

Kabag Hukum

LEVEL 0		LEVEL 1		LEVEL 2		PENGAMPU
		P.5.2	Penyelenggaraan Statistik	P.5.2.1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Diskominfostandi
		P.5.3	Pengelolaan Persandian	P.5.3.1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Diskominfostandi
P.6	Pengelolaan SDM Aparatur	P.6.1	Pengelolaan Manajemen dan Kapabilitas SDM Aparatur	P.6.1.1	Pengelolaan Manajemen SDM Aparatur	BKPSDM
				P.6.1.2	Peningkatan Profesionalisme SDM Aparatur	BKPSDM
P.7	Pengendalian dan Pengawasan	P.7.1	Pengelolaan Maturitas Penyelenggaraan SPIP	P.7.1.1	Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat Daerah
				P.7.2.1	Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
P.8	Penataan dan Kinerja Organisasi	P.7.2	Pengelolaan Level Kapabilitas APIP	P.8.1.1	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	SETDA (Bagian Organisasi)
		P.8.1	Pengelolaan Pelayanan Publik dan Ketata Laksanaan	P.8.1.2	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	SETDA (Bagian Organisasi)
		P.8.2	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	P.8.2.1	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	SETDA (Bagian Organisasi)
				P.8.2.2	Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	SETDA (Bagian Organisasi)

Paraf Koordinasi	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

LEVEL 0		LEVEL 1		LEVEL 2		PENGAMPU
		P.8.3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	P.8.3.1	Facilitasi Kinerja dan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	SETDA (Bagian Organisasi)
				P.8.3.2	Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	SETDA (Bagian Organisasi)
P.9	Pengelolaan Keuangan, BMD dan Pendapatan Daerah	P.9.1	Pengelolaan Keuangan	P.9.1.1	Pengelolaan APBD	BPKAD
		P.9.2	Pengelolaan Barang Milik Daerah	P.9.2.1	Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran BMD	BPKAD
				P.9.2.2	Penggunaan dan Pemanfaatan BMD	BPKAD
				P.9.2.3	Pengamanan dan Pemindahtanganan BMD	BPKAD
				P.9.2.4	Penatausahaan BMD	BPKAD
		P.9.3	Pengelolaan Pendapatan Daerah	P.9.3.1	Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Bapenda
P.10	Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	P.10.1	Perencanaan dan Pengendalian	P.10.1.1	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappelitbangda
				P.10.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappelitbangda

Paraf Koordinasi
Kabag Organisasi
Kabag Hukum



LEVEL 0		LEVEL 1		LEVEL 2		PENGAMPU
		P.10.2	Riset dan Inovasi	P.10.2.1	Riset dan Inovasi Daerah	Bappelitbangda
				P.10.2.2	Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Bappelitbangda
P.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	P.11.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	P.11.1.1	Pembinaan Kewilayahan Administrasi	SETDA (Bagian Tata Pemerintahan)
				P.11.1.2	Politik dan Pemerintahan Umum	SETDA (Bagian Tata Pemerintahan)
		P.11.2	Penyelenggaraan Otonomi Daerah	P.11.2.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah	SETDA (Bagian Tata Pemerintahan)
P.12	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan	P.12.1	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	P.12.1.1	Persiapan Pengadaan Barang/Jasa	SETDA (Bagian PBJ)
				P.12.1.2	Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa	SETDA (Bagian PBJ)
				P.12.1.3	Pelaksanaan Kontrak Barang/Jasa	SETDA (Bagian PBJ)
		P.12.2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	P.12.2.1	Pengelolaan Penyedia dan Katalog Elektronik	SETDA (Bagian PBJ)
		P.12.3	Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	P.12.3.1	Pembinaan SDM Pelaku Pengadaan	SETDA (Bagian PBJ)
				P.12.3.2	Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa	SETDA (Bagian PBJ)

Paraf Koordinasi	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

LEVEL 0		LEVEL 1		LEVEL 2		PENGAMPU			
P.13	Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Administrasi Umum	P.13.1	Pelayanan Kependudukan	Administrasi	P.13.1.1	Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil		
					P.13.1.2	Pencatatan Sipil	Disdukcapil		
					P.13.1.3	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapil		
					P.13.1.4	Pengelolaan Profil Kependudukan	Disdukcapil		
			P.13.2		Pelayanan Perizinan	P.13.2.1	Pelaksanaan Perizinan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP	
P.14	Penyelenggaraan Kearsipan	P.13.3	Pelayanan Fasilitas Dewan		P.13.3.1	Fasilitas Dewan	SETWAN		
			P.13.3.2		Fasilitas Aspirasi Masyarakat	SETWAN			
			P.13.4		Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	P.13.4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Wilayah Kecamatan	Kecamatan	
			P.14.1		Peningkatan Penyelenggaraan Kearsipan	Kualitas	P.14.1.1	Peningkatan Indeks Kearsipan	Disarpusda
			P.15		Kesekretariatan Daerah	P.15.1	Penyelenggaraan Hubungan Kelembagaan dan Pemberian Analisis Kebijakan		P.15.1.1
		P.15.1.2	Pemberian Analisis Kebijakan Bidang Kerjasama	SETDA (Bagian Kerjasama)					

Paraf Koordinasi	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

LEVEL 0		LEVEL 1		LEVEL 2		PENGAMPU
				P.15.1.3	Pemberian Analisis Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	SETDA (Bagian Kesejahteraan Sosial)
				P.15.1.4	Pemberian Analisis Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan	SETDA (Bagian Pembangunan)
				P.15.1.5	Pemberian Analisis Kebijakan Bidang Perekonomian	SETDA (Bagian Perekonomian)
		P.15.2	Penyelenggaraan Kegiatan Pimpinan	P.15.2.1	Penyelenggaraan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	SETDA (Bagian Tata Usaha)
		P.15.3	Dukungan Teknis dan Administrasi	P.15.2.2	Penyelenggaraan Umum dan Kerumahtanggaan	SETDA (Bagian Umum)
				P.15.3.1	Penyelenggaraan Ketatausahaan	SETDA (Bagian Tata Usaha)

Pj. WALI KOTA BEKASI,

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

R. GANI MUHAMAD